

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PERBURUHAN PERKEBUNAN TEBU  
DI JAWA PADA MASA LIBERALISME ( 1870 - 1900 )**

SKRIPSI



Oleh :

**Agus Susanto**

NIM : 93 1314 011

NIRM : 93005112060412001

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**1998**

**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**PERBURUHAN PERKEBUNAN TEBU  
DI JAWA PADA MASA LIBERALISME (1870-1900)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan**

**Program Studi Pendidikan Sejarah**

**oleh**

**Agus Susanto**

**Nim : 93 1314 011**

**Nirm : 93005112060412001**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
1998**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PERBURUHAN PERKEBUNAN TEBU  
DI JAWA PADA MASA LIBERALISME ( 1870-1900 )**

Skripsi

Oleh

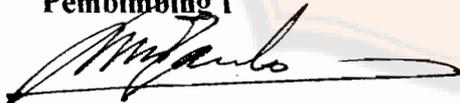
Agus Susanto

Nim : 93 1314 011

Nirm : 930051120604120011

Telah disetujui oleh:

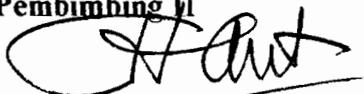
Pembimbing I



Drs. G. Moedjanto, M. A.

tanggal : 9 - 11 - 1998

Pembimbing II



Drs. A. K. Wiharvanto

tanggal : 9 - 11 - 1998

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PERBURUHAN PERKEBUNAN TEBU  
DI JAWA PADA MASA LIBERALISME (1870-1900)**

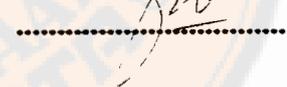
Skripsi  
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Agus Susanto  
Nim : 93 1314 011  
Nirm : 930051120604120011

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji  
pada tanggal 21 Oktober 1998  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**SUSUNAN PANITIA PENGUJI**

Ketua : Drs. A.K. Wiharvanto  
Sekretaris : Drs. B. Musidi, M.Pd.  
Anggota : 1. Drs. G. Moedjanto, M.A.  
2. Drs. A.K. Wiharvanto  
3. Drs. B. Musidi, M.Pd.

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Yogyakarta, 11-11-1998

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta  
Dekan,



DR. Paulus Suparno, S.J., M.S.T.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Motto:

“Manusia berusaha, Tuhan menentukan”



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sebab atas rahmat dan bimbingan-Nya- lah penulisan skripsi dengan judul **Perburuhan Perkebunan Tebu di Jawa Pada Masa Liberalisme ( 1870 - 1900 )** dapat diselesaikan.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar Sarjana Pendidikan Sejarah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
2. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Bapak Drs. G. Moedjanto, M. A., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, dukungan, dan dorongan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
4. Bapak Drs. A. K. Wiharyanto, selaku Dosen Pembimbing II yang juga dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, dukungan, dan dorongan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Bapak Drs. B. Musidi, M. Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan dukungan moril kepada penulis.
6. Staf perpustakaan Universitas Sanata Dharma, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, dan Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan peminjaman dan ijin menggunakan buku-buku, majalah, dan karya-karya ilmiah yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Saudari Maria Eksi yang telah membantu penulis dalam menerjemahkan abstrak ke dalam bahasa Inggris.
8. Saudara B. Mugiyat yang telah banyak membantu penulis dalam pengetikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Pendidikan Sejarah angkatan '93, teman-teman seperjuangan di Kolobendono 20 B, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu di sini, yang telah dengan caranya masing-masing memberikan bantuan, motivasi, dan perhatian kepada penulis.

Penulis juga sangat menyadari bahwa skripsi yang saya buat sendiri ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu kritik, saran, dan sumbangan pemikiran ke arah penyempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Yogyakarta,

Penulis

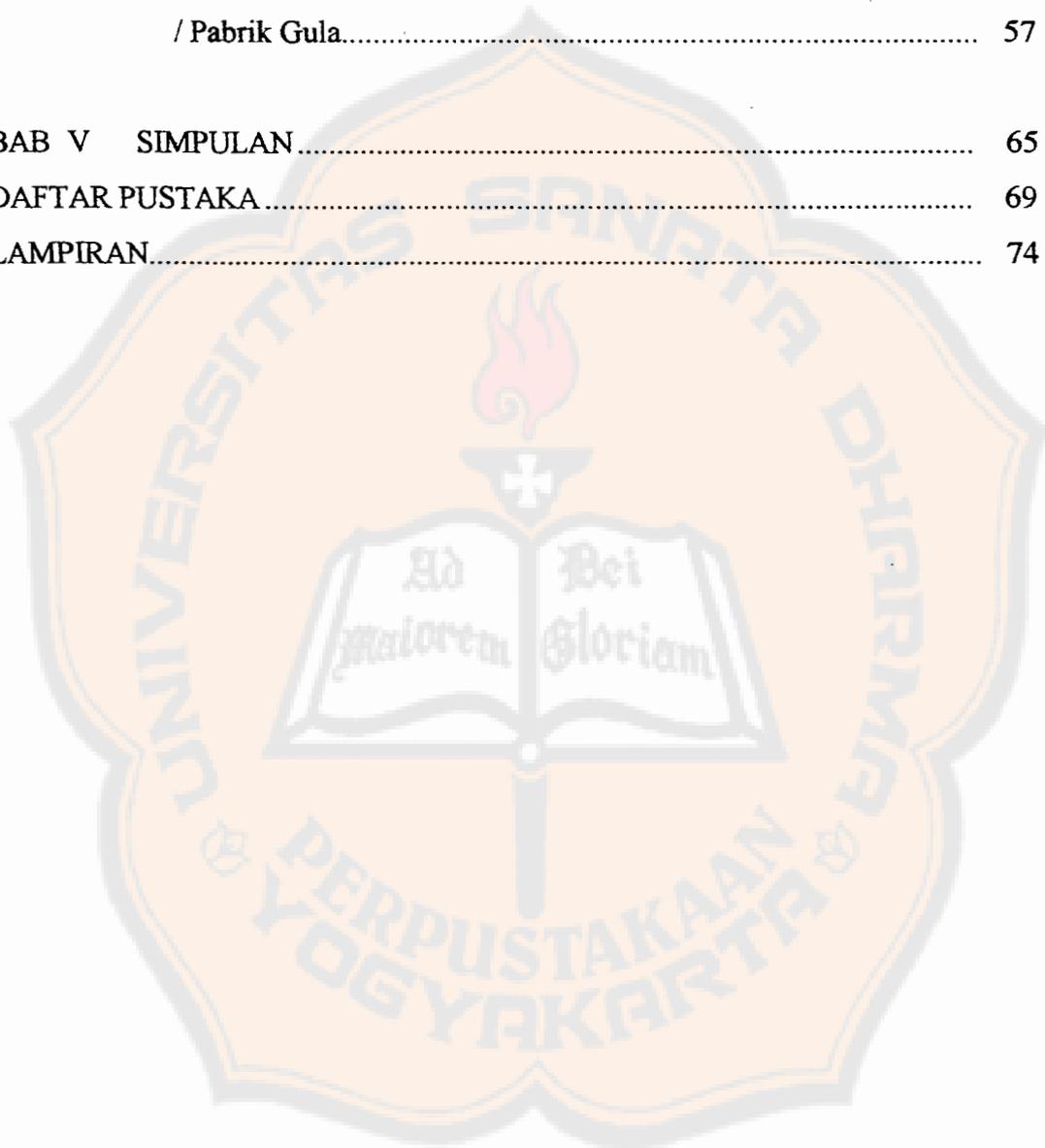
DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	III
HALAMAN PENGESAHAN.....	IV
HALAMAN MOTTO.....	V
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI .....	IX
ABSTRAK .....	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II REKRUTMEN BURUH OLEH PABRIK GULA.....	19
A. Kesulitan Ekonomi Penduduk Desa.....	19
B. Adanya Sistem Uang Muka.....	24
C. Peranan Para Kepala Desa.....	27
BAB III KEHIDUPAN BURUH PERKEBUNAN TEBU.....	33
A. Jenis-Jenis Pekerjaan di Perkebunan Tebu.....	33
B. Terjadinya Mobilitas Penduduk.....	37
C. Kehidupan Buruh Yang Menderita.....	41
D. Belum Berkembangnya Organisasi Buruh.....	48

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV	PERJUANGAN BURUH UNTUK MEMPERBAIKI NASIB.....	53
	A. Gerakan-Gerakan Kontra Eksploitatif.....	53
	B. Perjuangan Murni Dari Buruh Perkebunan Tebu / Pabrik Gula.....	57
BAB V	SIMPULAN.....	65
	DAFTAR PUSTAKA.....	69
	LAMPIRAN.....	74



## ABSTRAK

### PERBURUHAN PERKEBUNAN TEBU DI JAWA PADA MASA LIBERALISME (1870 - 1900)

Skripsi ini bertujuan untuk menjawab tiga permasalahan. Pertama, tentang usaha pabrik gula dalam memperoleh tenaga buruh untuk perkebunan tebu di Jawa pada masa liberalisme. Kedua, tentang kehidupan buruh perkebunan tebu di Jawa pada masa liberalisme. Ketiga, tentang perjuangan para buruh untuk memperbaiki nasib.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan. Sumber-sumber yang digunakan adalah sumber sekunder. Melalui studi pustaka langkah-langkah yang ditempuh tidak lepas dari sistem penelitian sejarah, dengan harapan akan menghasilkan sebuah karya yang logis, jelas, dan rasional.

Intisari dari skripsi ini dapat digambarkan sebagai berikut: Pada tahun 1830 Jawa memasuki periode *cultuurstelsel*. Praktek-praktek sistem itu ternyata menyengsarakan rakyat pribumi. Orang-orang liberal berniat untuk memperbaiki nasib rakyat pribumi. Mereka ingin mengubah politik kolonial dari campur tangan pemerintah menjadi usaha bebas. Keinginan itu terwujud dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula pada tahun 1870.

Kedua Undang-Undang itu menyebabkan mengalirnya modal asing ke Hindia Belanda secara besar-besaran. Modal itu terutama ditanam dalam sektor perkebunan, dan yang paling berkembang adalah sektor perkebunan tebu. Perkebunan itu diusahakan besar-besaran di Jawa karena tanahnya subur dan irigasinya cukup baik.

Perkebunan tebu adalah bagian dari industri gula. Salah satu faktor produksi yang menentukan dalam industri itu adalah tenaga kerja. Pengusaha diuntungkan karena ketika perkebunan diperluas penduduk desa di Jawa mengalami kesulitan ekonomi. Kehadiran perkebunan tebu dianggap dapat memecahkan masalah itu sehingga mereka mau bekerja sebagai buruh upahan. Untuk lebih mempercepat dalam memperoleh buruh para pengusaha memberi perangsang berupa uang muka. Sedangkan untuk mempermudah dalam teknis perekrutan para pengusaha memanfaatkan kewibawaan kepala desa.

Pekerjaan untuk buruh di perkebunan tebu tersedia sepanjang tahun karena adanya sistem *glebagan*. Pekerjaan di perkebunan tebu meliputi persiapan lahan dan penanaman, perawatan, dan penebangan. Tenaga kerja untuk satu periode tanam tercukupi oleh buruh dari desa-desa di sekitar perkebunan dan dari tempat yang jauh dari perkebunan. Mereka ada yang tinggal menetap di sekitar perkebunan dan ada yang hanya tinggal sementara saja. Kehidupan para buruh setelah bekerja di perkebunan ternyata tidak sejahtera. Keadaan itu sulit diubah karena tidak ada wadah yang menyalurkan aspirasi.

Meski belum ada organisasi yang modern, tetapi para buruh tetap menginginkan perubahan. Mereka melawan eksploitor dengan bergabung kepada gerakan-gerakan sosial yang ada seperti gerakan sosial keagamaan, pengecuan, perampokan dan pencurian. Di Yogyakarta perjuangan dilakukan

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dengan melakukan pemogokan pada tahun 1882. Aksi itu murni diprakarsai oleh para buruh. Melalui perjuangan mereka berhasil menaikkan upah dan meringankan beban kerja sehingga taraf hidup mereka juga meningkat.



ABSTRACT

SUGAR CANE PLANTATION LABOR IN JAVA  
IN THE ERA OF LIBERALISM (1870 - 1900)

The aim of this thesis is to answer three problems. The first problem concerning the effort of sugar factory in recruiting the labourers for their sugar cane plantations in Java in the era of liberalism. The second problem concerning the life of the labourers at that time and the third problem concerning their struggle in order to improve their lives.

This thesis is a result of library research, and the materials are taken from the secondary sources. The study is mostly concerns with historical research, expecting that the result will be logical, clear, and rational.

The essence of this thesis can be described as follows: In 1830, Java entered the *cultuurstelsel* period. The system brought the natives into a miserable life. Regarding these situations, liberal people were interested in improving their life. They wanted to change the system of colonial politics into a free venture. Their will came into a realization by the establishment of *Agrarische Wet* and *Suiker Wet* in 1870.

Those laws caused for the foreign capital to come to Netherlands India in enormous amount. The capital were primarily invested in the plantation sectors and the most developed sector was sugar cane plantation. There were many of them exist in Java because of it's fertile soil and good irrigations.

Sugar cane plantation was a part of sugar industry and one of the determining in that industry was labourers. The profits went to the investors because when the plantations were expanded the Javanese villagers were in the economic difficulty. The plantations were considered to be the solution so that many people were willing to work there for small salary. In order to faster the recruiting of the labourers, the investors gave them a down payment. In this case the investors were also using the villager chief's authority to make it faster.

The *glebagan* system enable the labourers to work for the whole year. The job in the plantations consisted of soil preparation and cultivation, nursery, and also the cutting down. The labourers for that job were sufficiently provided from the villagers around the plantations or even further. It turned out that the life of the labourers were still insecure and that situation was difficult to change because there was not any media for people's aspirations.

Eventhough the modern organization did not exist yet, the labourers were still demanded for a change. They struggled against exploitators by joining the social actions for example religious mevement, robbery, and burglary. In Jogjakarta, the struggle was done toward the strike in 1882. This action was purely motivated by the labourers. Through the struggle they succeeded in raising their salary and alleviating the working pressure so that they were able to live in prosperity.

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**



**A. Latar Belakang Masalah**

Tahun 1830 Jawa memasuki periode kedua dari sebuah sejarah penjajahan.<sup>1</sup> Ketika van den Bosch memegang jabatan gubernur jendral, ia mendapat tugas yang berat. Pada waktu itu keadaan ekonomi Belanda sedang kacau. Kekacauan tersebut merupakan warisan dari VOC dan karena besarnya keuangan yang dikeluarkan negara untuk membiayai perang-perang Napoleon. Perang Jawa (1825-1830) juga menelan biaya yang sangat besar. Sementara di Eropa terjadi pemberontakan Belgia menentang pemerintahan raja Willem I.<sup>2</sup> Oleh sebab itu tugas van den Bosch adalah mengembalikan keadaan ekonomi negaranya. Beban itu hendak dipenuhi dengan gagasannya yang kemudian dikenal dengan Sistem Tanam Paksa.

---

<sup>1</sup> Clifford Geertz membagi sejarah penjajahan di Jawa ke dalam tiga periode yang terpisah dan menyebut ketiganya sebagai tahap perkembangan. Ketiga periode itu adalah masa VOC ( abad XVII-XVIII ), masa Sistem Tanam Paksa ( 1830-1870 ), dan masa sistem perkebunan swasta (1870-1941). Hiroyoshi Kano, "Sejarah Ekonomi Masyarakat Pedesaan Jawa: Suatu Penafsiran Kembali" dalam Akira Nagazumi ( peny ), *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang* ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986 ), hlm. 16.

<sup>2</sup> Bernard H. M. Vlekke, *Nusantara ( Sejarah Indonesia )*, terjemahan ( Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Malaysia, 1960 ), hlm. 288.; lihat juga J. B. Robertson and J. Syprut ( eds ), *A History of Indonesia* ( New York: ST Martin's Press, 1967 ), hlm. 167.; Rudolf von Albertini, *European Colonial Rule, 1880-1940, The Impact of The West on India, South East Asia, and Afrika* ( England: Clio Press, 1982 ), hlm. 163.

Dalam pemerintahannya, Hindia Belanda seakan dibawa kembali pada jaman kompeni ( VOC ) yaitu eksploitasi dengan penyerahan wajib.<sup>3</sup> Sistem pajak tanah yang telah dipraktekkan pada pemerintahan sebelumnya kembali ditinggalkan. Sistem yang baru itu mengharuskan rakyat untuk menyerahkan pajak bukan berupa uang melainkan berupa barang ( natura ) dan tenaga kerja. Barang-barang itu digunakan sebagai kompensasi terhadap pajak tanah yang menurut van den Bosch masih dihutang oleh desa-desa di Jawa. Melalui berbagai aturan yang di atas kertas sangat ringan, rakyat diwajibkan menyisihkan sebagian tanahnya guna ditanami komoditi ekspor. Jenis tanaman yang utama adalah kopi, tebu, dan indigo. Hasilnya harus dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditentukan.

Di dalam pelaksanaannya van den Bosch menganut kembali sistem ekonomi merkantilisme<sup>4</sup> yang pada pemerintahan sebelumnya telah dicoba untuk ditinggalkan. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk ikut campur tangan dalam mengurus kehidupan ekonomi bersama-sama dengan pihak swasta. Para penguasa pribumi juga dilibatkan bahkan sampai ke desa-desa.

Kepala desa merupakan kunci paling bawah yang langsung berhubungan dengan rakyat. Tugas yang dipikulnya ialah mengerahkan rakyat untuk melakukan

---

<sup>3</sup> Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia* ( Yogyakarta: Aditya Media, 1991 ), hlm. 54.

<sup>4</sup> Merkantilisme adalah sistem ekonomi yang diselenggarakan dipelbagai negara sejak jaman pertengahan hingga kira-kira pertengahan abad ke-18. Tujuannya adalah hendak melindungi perkembangan industri dan perniagaan di negara masing-masing. Karena waktu itu di Eropa peredaran uang mulai berkembang, maka pengikut merkantilisme sangat mementingkan masuknya logam mulia seperti emas di negara mereka masing-masing. Pengawasan oleh negara merupakan bagian vital dalam sistem ini. Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 1983), hlm. 2210.

kerja wajib dan mengatur penyediaan tanah. Ia juga menjadi penghubung antara petani dengan pejabat-pejabat bangsa pribumi yang lebih tinggi tingkatannya. Pejabat pribumi yang tertinggi adalah bupati atau *regent*. Bupati bertanggung jawab kepada pemerintah melalui pejabat bangsa Eropa.<sup>5</sup>

Pemerintah menjadi mudah dalam memperoleh tanah dan tenaga kerja karena kepatuhan rakyat pada setiap perintah pejabat. Akhirnya rakyat selalu menjadi pihak yang menderita kerugian.

Tindakan-tindakan pemerintah yang tidak konsisten terhadap aturan serta penyelewengan-penyelewengan para pegawai semakin menambah penderitaan. Sebagai contoh dalam aturan disebutkan bahwa tanah yang harus disediakan rakyat tidak boleh melebihi seperlima dari yang dimiliki. Tenaga yang digunakan untuk mengurus tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga untuk mengurus tanaman pangan. Dalam prakteknya, tanah yang digunakan lebih dari seperlima bahkan sampai setengah dari tanah yang dimiliki oleh petani, dan dipilih tanah yang subur. Tenaga yang digunakan untuk mengurus tanaman wajib jauh melebihi tenaga yang digunakan untuk mengurus tanaman pangan. Adanya *cultuurprocenten*<sup>6</sup> membuat para pegawai semakin menekan rakyat.

---

<sup>5</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, terjemahan ( Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981 ), hlm. 185.

<sup>6</sup> *Cultuurprocenten* adalah prosentase tertentu dari penghasilan yang diperoleh dari penjualan tanaman ekspor yang diserahkan kepada para pegawai Sistem Tanam Paksa, jika berhasil mencapai atau melampaui target hasil yang telah ditentukan kepada tiap-tiap desa. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia IV* ( Jakarta: Balai Pustaka, 1990 ), hlm. 101.

Rakyat pribumi terus menerus merasakan penderitaan. Lahan untuk tanaman pangan semakin sempit karena dikurangi untuk penanaman wajib. Beban kerja yang terlalu lama dan memberatkan menyebabkan petani kurang dapat mengurus tanaman miliknya sendiri. Hal itu menyebabkan kegagalan panen yang berkepanjangan, sehingga kebutuhan pangan menjadi tidak tercukupi.

Selama tahun-tahun 1848 sampai 1850 terjadi kelaparan yang meluas di Jawa Tengah karena alasan-alasan di atas. Di Demak peristiwa ini terjadi pada tahun 1848 dan di Grobogan terjadi pada tahun 1849. Daerah Priangan juga mengalami kelaparan pada sekitar tahun 1849. Bahkan di Cirebon kelaparan telah terjadi pada tahun 1843.<sup>7</sup>

Sesuatu yang ironis terjadi bahwa di tengah penderitaan rakyat ternyata van den Bosch justru dinilai berprestasi oleh pemerintah di Eropa. Ia telah berhasil memperbaiki keadaan keuangan dalam negeri karena memperoleh *batig slot* atau saldo untung yang berlebihan. Keuntungan yang masuk ke negeri Belanda dalam tahun 1832 sampai dengan tahun 1867 berjumlah *f* 497 juta, dalam sepuluh tahun berikutnya *f* 287 juta, dan keuntungan seluruhnya berjumlah *f* 784 juta.<sup>8</sup>

Keadaan itu mulai menimbulkan reaksi terutama dari orang-orang Belanda sendiri yang berhaluan liberal. Situasi politik dalam negeri Belanda mengalami perubahan. Liberalisme yang berkembang di Eropa sejak awal abad ke-19 ikut

---

<sup>7</sup> D. G. E. Hall, *Sejarah Asia Tenggara*, terjemahan (Surabaya: Usaha Nasional, 1988), hlm. 520.; lihat juga M. C. Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 188.

<sup>8</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Sejarah Ekonomi Indonesia Dari Segi Sosiologi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), hlm. 217.

pula mempengaruhi keadaan di sana. Golongan liberal berusaha tampil ke muka untuk menggantikan golongan konservatif yang sedang berkuasa. Tokoh-tokoh yang tampil adalah F. van de Putte, Thorbecke, dan lain-lain. Golongan tersebut mendapat dukungan dari para pengusaha swasta dan pemilik modal. Mereka menginginkan kebebasan dalam berusaha dan menanamkan modal yang dimiliki.

Selain itu terdapat pula golongan Humanis yang juga menghendaki dihapusnya Sistem Tanam Paksa. Tokoh-tokohnya antara lain Baron van Hoevell dan Edward Douwes Dekker.

Pada tahun 1848 di bawah pimpinan Thorbecke, usaha golongan liberal berhasil meraih kemenangan. Undang-Undang baru yang bersifat liberal telah lahir.<sup>9</sup> Menurut Undang-Undang ini akan dibentuk sebuah kabinet ministerial yang bertanggungjawab kepada *Staten General*. Tanah jajahan yang semula berada di bawah pengawasan raja diambil alih oleh *Staten General*. Selain itu setiap individu diberi kebebasan untuk beragama, berkumpul, berserikat dan berpendapat.<sup>10</sup>

Kritik-kritik terhadap dampak Sistem Tanam Paksa juga semakin hebat. Diterbitkannya buku karangan Edward Douwes Dekker, dengan nama samaran Multatuli, yang berjudul *Max Havelaar* atau *Pelelangan Kopi Persekutuan Dagang Belanda* telah membuka mata rakyat Belanda di Eropa tentang keadaan di Hindia. Oleh pembacanya buku ini sering dibandingkan dengan pengaruh

---

<sup>9</sup> J. S. Furnivall, *Netherlands India* (Cambridge: Cambridge University Press, 1967), hlm. 154.

<sup>10</sup> E. Kosim, "Suatu Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia Akibat Dari Imperialisme Jang Bersembojan Faham Liberal Pada Akhir Abad ke-19", *Makalah Seminar Sejarah Nasional II*, 26-29 Agustus 1970 di Yogyakarta.

*Uncle Tom's Cabin*<sup>11</sup> yang ada di Amerika.<sup>12</sup> Dalam buku ini digambarkan tentang merajalelanya korupsi dari para pegawai bangsa Belanda dan bangsa Indonesia sendiri yang dibiarkan saja oleh pemerintah kolonial. Dilukiskan pula tentang kemelaratan penduduk Jawa sebagai akibat dari Sistem Tanam Paksa. Dalam salah satu bagian dari buku itu Multatuli melukiskan sebagai berikut:<sup>13</sup>

.....Bahaya kelaparan ? .....Di pulau Jawa yang subur dan kaya itu, bahaya kelaparan ? Ya, saudara pembaca : beberapa tahun yang lalu ada distrik-distrik yang seluruh penduduknya mati kelaparan, ..... ibu-ibu menjual anaknya untuk makan,..... ibu-ibu makan anaknya sendiri.....

Dari petikan di atas dapat dilihat betapa menderitanya rakyat Hindia Belanda yang dilihat sendiri oleh pengarangnya. Pada tahun 1856 Douwes Dekker menjadi asisten residen di Lebak. Kritikan ini semakin menambah keyakinan bahwa Sistem Tanam Paksa sudah tidak cocok lagi untuk dipraktekkan dan diperlukan sistem ekonomi yang lebih memperhatikan nasib rakyat pribumi. Akhirnya tanaman pemerintah yang kurang penting seperti indigo, tembakau, dan teh perlahan-lahan mulai dihapuskan.

Di negeri Belanda sendiri para pengusaha dan golongan liberal bersama-sama berusaha mematahkan sistem ekonomi merkantilisme. Para pengusaha terdorong oleh keinginannya untuk menanamkan modal dengan bebas, sementara

---

<sup>11</sup> *Uncle Tom's Cabin* adalah buku yang dikarang oleh Harriet Beecher Stowe, seorang yang menentang perbudakan di Amerika. Isinya adalah cerita tentang penderitaan budak di perkebunana. Buku ini berhasil mempengaruhi pendapat umum tentang perbudakan. Franklin Escher, *Dari Koloni Menjadi Salah Satu Negara Terbesar, Sedjarah Ringkas Amerika Serikat*, terjemahan, ( Djakarta: Endang, 1954 ), hlm. 84.

<sup>12</sup> Clive Day, *The Policy And Administration of The Dutch in Java* ( Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1966 ), hlm. 331.

<sup>13</sup> Multatuli, *Max Havelaar*, terjemahan ( Djakarta : Djambatan, 1972 ), hlm. 64.

golongan kedua berkeyakinan bahwa kebebasan dalam lapangan ekonomi akan dapat meningkatkan kesejahteraan.

Politik merkantilisme dari Willem I harus dihentikan. Pemerintah kerajaan harus menarik diri dari prinsip turut campur tangan dalam masalah-masalah ekonomi. Ini berarti segala kekangan terhadap kebebasan dan inisiatif individu harus dihilangkan. Demikian pula dengan bantuan pemerintah terhadap usaha swasta.

Meskipun golongan liberal telah memegang kekuasaan sejak tahun 1848, tetapi kebijakan-kebijakan terhadap pengganti Sistem Tanam Paksa masih menjadi perdebatan di parlemen. Sistem kebebasan berusaha, kebebasan bekerja, dan kebebasan berkebun di Hindia Belanda masih menjadi permasalahan karena ada yang pro dan kontra. Kesepakatan baru tercapai pada tahun 1870.<sup>14</sup> Disahkannya Undang-Undang Agraria yang mulai berlaku pada tahun itu juga, dianggap sebagai realisasi terhadap ide-ide liberal. Undang-Undang itu bermaksud melindungi hak milik pribadi rakyat atas tanah dan membuka kesempatan pada pihak swasta untuk menyewa tanah dalam jangka waktu paling lama 75 tahun.<sup>15</sup>

Mulai saat itu para pengusaha barat menanamkan modalnya di Hindia Belanda secara besar-besaran. Perkebunan adalah sektor yang paling berkembang.

---

<sup>14</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme Jilid II* ( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992 ), hlm. 21.

<sup>15</sup> Untuk isi sepenuhnya dari Undang-Undang Agraria dapat dilihat misalnya dalam Josef Johannes Blintanagy, *Hukum Agraria Nasional* ( Ende - Flores: Nusa Indah, 1984 ), hlm. 16-18.; lihat juga J. S. Furnivall, *op. cit.*, hlm. 179.

Pulau Jawa menjadi sentral usaha karena tanah dan tenaga kerja cukup tersedia. Kedua hal tersebut merupakan faktor produksi yang sangat penting. Tebu yang menjadi tanaman utama di Jawa sejak jaman kompeni makin diusahakan dalam skala yang lebih besar.

Sesuai dengan topik tulisan ini, maka uraian selanjutnya akan berkisar pada perkebunan tebu di Jawa. Tebu merupakan tanaman utama di Jawa selain kopi dan indigo. Untuk dapat tumbuh dengan baik, tanaman tebu memerlukan syarat-syarat yang hampir sama dengan padi. Tanah yang digunakan harus subur dan pengairan harus cukup, maka sistem irigasi yang baik sangat dibutuhkan. Syarat-syarat ini dapat terpenuhi di Pulau Jawa. Dari hasil penelitian diketahui bahwa daerah-daerah gula terletak di daerah yang memiliki sawah yang luas.<sup>16</sup>

Daerah-daerah utama penghasil gula adalah pantai utara Pulau Jawa yang memiliki sistem pengairan yang sangat baik, yaitu karesidenan-karesidenan antara Cirebon sampai Semarang. Kemudian daerah selatan Gunung Muria hingga Juana. Kemudian daerah kerajaan ( *Vorstenlanden* )<sup>17</sup> termasuk produsen gula yang baik pula, menyusul karesidenan Madiun, Kediri, dan Besuki di Jawa Timur. Selain itu wilayah Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan daerah Surabaya hingga Jombang di pantai utara juga termasuk produsen utama gula.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Clifford Geertz, *Involusi Pertanian Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, terjemahan ( Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1983 ), hlm. 78.

<sup>17</sup> Yang termasuk daerah kerajaan ( *Vorstenlanden* ), a. l., adalah Yogyakarta dan Surakarta.

<sup>18</sup> R. Z. Leirissa dkk, *Sejarah Perekonomian Indonesia* ( Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1996 ), hlm. 69.

Pada abad ke- 19 industri gula meliputi pabrik gula dan perkebunan tebu.<sup>19</sup>

Oleh karena itu perkebunan tebu adalah pemasok bahan baku dalam pabrik gula. Semakin banyaknya pabrik gula yang didirikan menuntut pula perluasan perkebunan tebu.

Hal itu didukung oleh keluarnya Undang-Undang Gula pada tahun 1870. Isinya adalah pengubahan secara bertahap dari penanaman paksaan menjadi penanaman perusahaan swasta, yang akan dikerjakan dengan perjanjian-perjanjian suka rela dengan rakyat. Penanaman paksaan milik pemerintah tidak akan diperluas lagi dan campur tangan pemerintah akan dikurangi. Selanjutnya untuk pemakaian tanah akan diberikan ganti kerugian pada pemilik-pemilik tanah. Bantuan pemerintah akan diberikan hanya jika betul-betul membutuhkan. Mulai tahun 1879 penanaman-penanaman paksaan akan dikurangi secara berangsur-angsur, sehingga dalam tahun 1891 campur tangan pemerintah dalam penanaman tebu akan dihentikan.<sup>20</sup>

Sesuai dengan prinsip-prinsip liberal maka para pengusaha juga dijamin kebebasannya dalam mengadakan kontrak dengan para petani. Mengenai pertanahan telah diatur dengan Undang-Undang Agraria. Selain tanah, faktor tenaga kerja merupakan unsur utama dalam perkebunan tebu. Untuk memperolehnya para pengusaha diharapkan dapat mengadakan perjanjian secara suka rela dengan penduduk desa yang akan menjadi buruh di perkebunan.

---

<sup>19</sup> Bambang Sulistyono, *Pemogokan Buruh, Sebuah Kajian Sejarah* ( Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1995 ), hlm. 25.

<sup>20</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *op. cit*, hlm. 237.

Perjanjian berkisar pada jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, dan upah yang akan diterima. Sementara para pengusaha juga menuntut kesetiaan para buruh terhadap perjanjian yang telah disepakati.

Tenaga kerja yang diperlukan untuk satu periode tanam tebu jumlahnya sangat besar. Hal ini disebabkan oleh tanaman itu yang memerlukan penanganan intensif mulai dari persiapan tanam hingga masa panen, apalagi sampai proses produksi di pabrik. Sebagai gambaran dapat dilihat pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Fasseur yang dilakukan di luar daerah kerajaan Surakarta dan Yogyakarta pada abad ke-19. Pada musim giling, selama lebih kurang lima bulan setiap tahun, pabrik gula memerlukan tenaga 1.050 orang. Dengan perincian 350 orang pekerja kebun, 300 orang pekerja pabrik, 250 orang tebang tebu, dan 150 orang kusir gerobak. Dari hitungan itu terlihat bahwa untuk perkebunan sendiri memerlukan separuh lebih dari seluruh kebutuhan tenaga kerja.<sup>21</sup> Bila ditambah dengan tenaga untuk persiapan lahan, penanaman, dan perawatan maka jumlahnya jauh di atas angka tersebut.

Setelah tahun 1870 kebutuhan tenaga kerja semakin meningkat seiring dengan perluasan perkebunan tebu di seluruh Jawa. Kebutuhan itu tercukupi dengan hadirnya para buruh baik yang tetap maupun musiman. Bahkan sekitar tahun 1890-an muncul pula buruh wanita dan anak-anak. Kehadiran para buruh itu tidak dapat dilepaskan dari desakan-desakan ekonomi yang menimpa kehidupan mereka sehari-hari.

---

<sup>21</sup> Suhartono, *Apanage Dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1991), hlm. 10.

Keadaan hidup para buruh setelah bekerja di perkebunan tebu menjadi menarik untuk disimak. Buruh perkebunan tebu di Jawa memang hanya bagian kecil dari rakyat pribumi akan tetapi dari obyek ini, kita juga akan memperoleh sebagian gambaran tentang terwujud tidaknya tujuan golongan liberal yang ingin menyejahterakan rakyat pribumi.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana pabrik gula memperoleh tenaga buruh untuk perkebunan tebu di Jawa pada masa liberalisme ?
2. Bagaimana keadaan hidup buruh perkebunan tebu di Jawa pada masa liberalisme ?
3. Bagaimana para buruh berjuang untuk memperbaiki keadaan hidupnya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang usaha-usaha pabrik gula dalam memperoleh tenaga buruh untuk perkebunan tebu di Jawa pada masa liberalisme, tentang kehidupan buruh perkebunan tebu di Jawa pada masa liberalisme, serta tentang usaha para buruh untuk memperbaiki keadaan hidupnya.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan informasi tentang sejarah nasional Indonesia yang lebih

spesifik yaitu tentang perburuhan perkebunan tebu di Jawa pada masa liberalisme tahun 1870-1900.

2. Bagi dunia pendidikan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi tambahan informasi atau bahan pengajaran sejarah di sekolah.
3. Bagi para pembaca umumnya, diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai sejarah Indonesia, khususnya mengenai perburuhan perkebunan tebu di Jawa pada masa liberalisme tahun 1870-1900.

### E. Penjelasan Istilah

Berbicara tentang judul di atas, ada konsep yang perlu dijelaskan yaitu tentang pengertian liberalisme. Nama liberalisme baru timbul pada awal abad ke-19 di Spanyol dari sebuah partai politik yang menamakan dirinya *liberales*.<sup>22</sup> Meskipun demikian azas itu sudah timbul jauh sebelum waktu itu yaitu sejak abad pertengahan dengan hadirnya kaum intelektual yang ingin membatasi kekuasaan para bangsawan, Gereja, dan *gilde-gilde*.<sup>23</sup> Akhirnya liberal adalah sebuah istilah yang dipakai oleh negara-negara lain untuk merancang sebuah pemerintahan, bentuk organisasi negara, sebuah partai, kebijakan, pendapat, dan seni yang mengutamakan kebebasan sebagai oposisi terhadap sifat-sifat yang otoriter.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> J. Salwyn Schapiro, *Liberalism It's Meaning And History* (New York: Princeton, 1959), hlm. 9.

<sup>23</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1992), hlm. 33-34.; lihat juga W. Phillips Shively, *Power And Choice. An Intoduction to Political Science* ( Mc Craw-Hill Inc, 1991), hlm. 46.

<sup>24</sup> Guido de Ruggiero, *The History of European Liberalism* (Boston: Beacon Press, 1967), hlm. 357.

Aliran liberalisme sangat mempertahankan kebebasan perseorangan atau individu terhadap kekuasaan yang hendak berlaku secara mutlak. W. Phillips Shively menjelaskan sebagai berikut:<sup>25</sup>

Liberalism posits as the highest good of society the ability of the members of that society to develop their individual capacities to the fullest extent. That is, in a good society, all individuals should be able to develop their minds, musical talents, athletics abilities, or any other gift as much as possible. This requires, according to liberalism, that people be maximally responsible for their own actions, rather than having someone else do things for them or tell them what to do.

Dalam lapangan keagamaan liberalisme menuntut kemerdekaan atau kebebasan untuk memilih kepercayaan menurut keyakinan masing-masing. Dengan perkataan lain aliran ini memperjuangkan toleransi agar tiap-tiap pemeluk agama saling hormat menghormati.

Dalam lapangan ekonomipun liberalisme juga menuntut kemerdekaan. Dalam bidang ini umumnya ada dua macam liberalisme yaitu liberalisme klasik dan liberalisme baru ( neo liberalisme ).<sup>26</sup> Liberalisme klasik mencapai puncak perkembangannya dalam abad ke-19. Menurut liberalisme ini pemerintah jangan sekali-kali turut campur tangan dalam soal-soal perekonomian. Dengan demikian, maka segala tindakan partikelir hanya terpengaruh oleh cara terbentuknya harga, sehingga kemakmuran rakyat dapat terjamin. Liberalisme baru ( neo liberalisme ) kelihatan dalam abad ke-20 yang berpendapat bahwa perekonomian harus berdasarkan persaingan. Bedanya dengan liberalisme klasik adalah bahwa

---

<sup>25</sup> W. Phillips Shively, *loc. cit.*

<sup>26</sup> Hassan Shadily, *op. cit.*, hlm. 2005.

menurut neo liberalisme pemerintah hendaknya mengadakan peraturan-peraturan tertentu, supaya persaingan tersebut senantiasa berlaku secara tertib dan positif.

Dalam ekonomi bebas, harga-harga komoditi akan ditentukan oleh pasar, yaitu hukum ekonomi berupa persediaan dan permintaan. Individu-individu akan terlibat dalam kontrak-kontrak yang bebas sebagaimana pembeli dan penjual, pekerja dan lapangan kerja, serta tuan tanah dan penyewa. Kontrak yang di hasilkan akan menguntungkan keduanya. Demikian pula halnya dengan buruh, yang bagaikan barang dagangan. Buruh sebagai penjual tenaga dan majikan sebagai pembelinya, yang berdasarkan kontrak akan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>27</sup>

Prinsip lain dari liberalisme adalah persamaan bagi semua orang di mana saja. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama di bawah Undang-Undang. Perangkat hukum inilah yang sekaligus membatasi kebebasan mereka. Kekuasaan negara juga ikut dibatasi.<sup>28</sup>

Semua orang juga mempunyai hak yang sama dalam hal perlindungan dan hukuman, kesempatan berusaha, mengembangkan diri, dan persamaan dalam politik. Persamaan dalam bidang politik salah satunya tercermin dalam hak-hak yang sama bagi tiap orang untuk memilih dan dipilih sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

---

<sup>27</sup> J. Salwyn Schapiro, *op. cit.*, hlm. 33-34.

<sup>28</sup> Guido de Ruggiero, *op. cit.*, hlm. 367.; lihat juga J. Salwyn Schapiro, *op. cit.*, hlm. 10.

## F. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul Perburuhan Perkebunan Tebu di Jawa Pada Masa Liberalisme 1870-1900 ini merupakan penelitian historis. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Metode ini mempunyai pengertian sebagai suatu penelitian yang mengaplikasikan metode pemecahan yang ilmiah dari perspektif historis suatu masalah.<sup>29</sup>

Melalui metode deskriptif analitis, peristiwa-peristiwa sejarah berusaha dijelaskan berdasarkan hubungan sebab-akibat, faktor kondisional, serta memperhatikan dimensi ruang dan waktu. Dengan demikian sebagai suatu penelitian diharapkan dapat membawa peneliti kepada suatu interpretasi yang kritis. Kemudian hasilnya dapat dituangkan dalam tulisan yang logis, jelas, dan rasional.

Untuk memperoleh sumber-sumber penulisan, maka digunakan suatu penelitian pustaka (*library research*), sehingga yang tersaji adalah hasil studi kepustakaan. Penelitian pustaka menurut I Gusti Ngurah Agung adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan.<sup>30</sup> Hal tersebut disebabkan oleh obyek penelitian itu sendiri yang telah terjadi pada abad ke-19, sehingga penggunaan metode lain seperti wawancara tidak mungkin dilaksanakan.

---

<sup>29</sup> Winarno Surachmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Tehnik* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 132.

<sup>30</sup> I Gusti Ngurah Agung, *Metode Penelitian Sosial, Pengertian dan Pemakaian Praktis* (Jakarta: PT Gramedia, 1992), hlm. 9.

Sumber-sumber tulisan yang diperoleh berupa data historis. Data historis yang dimaksud adalah kumpulan keterangan yang berhubungan dengan proses perkembangan historis dari fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial dalam perurutan temporal yang mengandung dimensi waktu, yang memberikan stampel pembentuk sehingga terwujud keadaan sekarang.<sup>31</sup>

Data historis tersebut didapatkan dari sumber utama berupa sumber sekunder yaitu buku-buku yang dimiliki sendiri maupun yang dipinjam dari pihak lain seperti dari dosen dan dari perpustakaan. Selain itu juga berasal dari makalah-makalah, majalah, skripsi, dan tesis yang mendukung. Data sekunder pada umumnya tidak lepas dari unsur subyektifitas pengarangnya. Sehubungan dengan kelemahan itu, maka data tersebut harus diselidiki dan diinterpretasikan sebaik mungkin. Hal ini perlu karena sejarah merupakan deskripsi yang terpadu dari keadaan-keadaan atau fakta-fakta masa lampau yang ditulis berdasarkan penelitian serta studi kritis untuk mencari suatu kebenaran.<sup>32</sup>

Adapun langkah-langkah atau prosedur yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan topik untuk diselidiki.
2. Pengumpulan sumber-sumber informasi yang mungkin diperlukan untuk topik tersebut.
3. Pengujian sumber-sumber tersebut untuk mengetahui sejati tidaknya.

---

<sup>31</sup> Kartini Kartono, *Pengantar metodologi Research Sosial* (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 225-226.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 233.

4. Pemetikan unsur-unsur yang dapat dipercaya dari sumber-sumber (atau bagian dari sumber-sumber) yang terbukti sejati.
5. Historiografi yaitu rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh.<sup>33</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan.**

Hasil Penelitian ini tersaji dalam lima bab yang masing-masing bab secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini disajikan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan liberalisme, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bagian ini menjawab permasalahan pertama dari tulisan ini. Di dalamnya memuat usaha pabrik gula dalam mengerahkan tenaga buruh. Aspek-aspek yang dikupas adalah tentang kesulitan ekonomi yang diderita oleh penduduk desa sebelum mereka menjadi buruh di perkebunan. Selain itu dikemukakan pula mengenai adanya sistem uang muka dan peranan para kepala desa.

BAB III : Bagian ini mengupas tentang kehidupan buruh di perkebunan tebu. Hal-hal yang disajikan adalah jenis-jenis pekerjaan di perkebunan tebu, terjadinya mobilitas penduduk, keadaan buruh yang menderita,

---

<sup>33</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), hlm. 89.; lihat juga Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan (Jakarta: Universitas Indonesia, 1975), hlm. 32-34.

serta belum berkembangnya organisasi buruh sebagai penyalur keluhan para buruh.

BAB IV : Bagian ini menyajikan usaha buruh dalam memperbaiki nasibnya. Di dalamnya diuraikan tentang gerakan-gerakan untuk menentang eksploitasi yang dilakukan oleh para penguasa. Gerakan-gerakan itu masih bersifat umum, artinya tidak hanya dilakukan oleh buruh perkebunan tetapi juga oleh petani dan tokoh agama. Di dalam bagian ini diuraikan pula mengenai perjuangan yang murni dilakukan oleh buruh tebu. Kasus yang ditampilkan adalah pemogokan buruh tebu yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 1882.

BAB V : Bab V adalah bagian terakhir dari tulisan ini. Dalam bagian penutup ini akan disimpulkan berbagai jawaban dari permasalahan seperti yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

Dengan sistematika tersebut diharapkan pembaca dapat memperoleh gambaran awal terhadap keseluruhan tulisan ini. Selanjutnya akan diuraikan masing-masing bab secara terperinci.

## BAB II

### REKRUTMEN BURUH OLEH PABRIK GULA

Ketika terjadi perluasan perkebunan tebu secara besar-besaran, para pengusaha memerlukan tenaga kerja yang besar pula. Sejalan dengan itu penduduk pedesaan di Jawa mengalami tekanan ekonomi yang cukup berat. Bagian ini akan mencoba mencari benang merah antara keduanya. Bagaimana hubungan antara kesulitan ekonomi penduduk desa dengan kebutuhan para pengusaha akan tenaga kerja akan dikupas dalam sub bab yang pertama. Dalam sub bab kedua dan ketiga masing-masing akan dibicarakan tentang adanya sistem uang muka yang ternyata sangat memikat para buruh, dan peranan para kepala desa yang masih dimanfaatkan oleh para pengusaha.

#### A. Kesulitan Ekonomi Penduduk Desa

Dalam bab pendahuluan telah disinggung tentang adanya desakan-desakan ekonomi rakyat yang ikut mendorong kehadiran mereka sebagai buruh. Peningkatan jumlah penduduk yang pesat di Pulau Jawa selama abad ke-19 telah memberikan beban yang berat bagi kehidupan. Hal itu masih ditambah dengan semakin menyempitnya lahan pertanian setelah praktek Sistem Tanam Paksa, dan lebih hebat lagi setelah tahun 1870.

Meskipun pada pertengahan abad ke-19 terjadi kelaparan hebat di daerah Demak, Grobogan, Priangan, dan Cirebon tetapi hal itu tidak begitu berpengaruh

pada penurunan jumlah penduduk di Jawa. Menurut perhitungan Bleeker, jumlah penduduk Jawa pada tahun 1846 adalah 9.542.045 jiwa. Sementara itu pada tahun 1880 jumlah itu telah mencapai 19.798.505 jiwa (lamp. 2). Dengan demikian setiap tahun rata-rata terjadi penambahan jumlah penduduk sekitar 301.541 jiwa.

Sebagian besar dari jumlah itu tinggal di pedesaan. Mereka menggantungkan hidup pada sektor pertanian tradisional. Sebelum tahun 1870 perburuhan bebas belum berkembang.

Sementara itu sektor perdagangan dikuasai oleh orang-orang Arab dan Tionghoa. Usaha-usaha penduduk pribumi tidak mampu bersaing dan terdesak oleh usaha asing itu. Dengan demikian sektor yang paling mudah diusahakan adalah bidang pertanian. Hasil-hasil pertanian yang diperoleh digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sejak permulaan Sistem Tanam Paksa rakyat juga ditekan dengan berbagai kerja wajib. Pada masa itu terdapat tiga macam pelayanan yaitu: Pertama, kerja wajib umum yang mencakup pelayanan kerja untuk umum seperti pembangunan dan perbaikan jalan dan gedung-gedung perkantoran. Kedua, kerja wajib *pancen* yang mencakup tugas pelayanan kerja pertanian di tanah milik para kepala pribumi. Ketiga, kerja wajib garap penanaman yang mencakup pengerjaan lahan perkebunan, panen, serta pengangkutan hasil dari panen.<sup>34</sup> Adanya

---

<sup>34</sup> Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *op. cit.*, hlm. 59.; lihat juga Willem Wolters, "From Corvee to Contract Labour, Institutional Innovation in a Central Javanese Village Around The Turn of The Century" dalam Robert Cribb, *The Late Colonial State in Indonesia Political and Economic Foundation of The Netherlands Indies 1880-1942* (Leiden: KITLV Press, 1994), hlm. 175.; J.S. Furnivall, *op. cit.*, hlm.182.

berbagai wajib kerja tersebut sangat menyita waktu para petani sehingga harus mengorbankan pekerjaan mereka sendiri.

Jumlah penduduk Jawa yang terus bertambah menuntut perluasan lahan pertanian, karena kebutuhan konsumen yang harus dipenuhi pasti juga meningkat. Tetapi hal itu justru terjadi sebaliknya. Lahan pertanian ternyata semakin sempit. Indikasi penyempitan lahan pertanian nampak sejak adanya perkebunan pada masa Sistem Tanam Paksa.

Pada tahun 1833 di daerah gula terdapat 484.000 bau (1 bau = 0,72 ha) tanah rakyat, yang kurang lebih setengahnya terdiri dari sawah. Dari jumlah itu lebih dari 40.500 bau ditanami tebu. Artinya lahan yang ditanami tebu sekitar seperduabelas dari seluruh tanah atau seperenam dari luas tanah sawah. Luas itu memang masih lebih kecil dari seperlima dalam aturan Sistem Tanam Paksa.<sup>35</sup>

Dalam tahun 1840 jumlah areal tanaman tebu meningkat menjadi 44.666 bau. Pada tahun 1870 jumlahnya menjadi 54.176 bau. Setelah tahun 1870 perluasan perkebunan tebu semakin hebat. Pada tahun 1900 luasnya telah mencapai 128.301 bau.<sup>36</sup>

Perluasan areal perkebunan tebu sangat merugikan petani. Hal itu dikarenakan para pengusaha pabrik gula cenderung memilih tanah-tanah sawah yang subur untuk meningkatkan hasil produksi. Para petani pribumi justru kebagian tanah yang relatif kurang subur.

---

<sup>35</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *op. cit.*, hlm. 198.

<sup>36</sup> G. Gonggrijp, *Sedjarah Ekonomis Indonesia*, terjemahan (Yogyakarta: Stensilan, 1967), hlm. 124. ; bdk dengan Prajudi Atmosudirdjo, *op. cit.*, hlm. 238.

Keadaan pertanian yang buruk dan semakin meningkatnya jumlah penduduk ternyata tidak diikuti oleh peningkatan sumber daya manusia. Teknik pengolahan pertanian yang dimiliki tidak mengalami perkembangan yang berarti. Oleh karena itu lahan pertanian yang tersisa tidak dapat berproduksi secara maksimal.

Sementara itu masyarakat masih terbiasa dengan pola hidup komunal. Geertz menjelaskan bahwa dalam proses involusi pertanian, massa manusia harus hidup dari produk pertanian secara merata atau sekurang-kurangnya sama. Masyarakat tetap mempertahankan tingkat homogenitas sosial dan ekonomi dengan cara membagi-bagikan rejeki yang ada. Masing-masing anggota menerima semakin kecil dari rejeki itu. Proses tersebut oleh Geertz disebut sebagai kemiskinan yang dibagi rata atau kemiskinan bersama. Masyarakat tidak terbagi atas golongan *have* dan *have nots*, melainkan dengan istilah yang biasa dipakai dalam kehidupan petani (Jawa) golongan cukupan dan kekurangan.<sup>37</sup>

Untuk mengatasi kesulitan hidupnya, penduduk desa mencari alternatif baru dengan memasuki dunia kerja upahan. Para pemilik tanah yang menyewakan tanahnya kepada pihak pengusaha sekaligus dapat menjadi buruh di perkebunan itu. Sektor ini sangat mungkin menjadi suatu pilihan, mengingat setelah tahun 1870 tenaga kerja untuk perkebunan tebu dan pabrik gula sangat dibutuhkan. Ternyata bertambahnya jumlah penduduk di satu pihak dan semakin merosotnya

---

<sup>37</sup> Clifford Geertz, *op. cit.*, hlm. 102.

produksi pertanian di pihak lain telah memberikan kemudahan kepada para pengusaha dalam memperoleh tenaga buruh.

Kecenderungan semacam itu terus berkembang karena upah yang ditawarkan pihak pengusaha dipandang dapat untuk menutup biaya kebutuhan hidup sehari-hari. Lebih-lebih jika musim tebang dan giling tebu datang, maka kebutuhan akan tenaga kerja semakin meningkat. Hal itu telah menjadi motivasi yang kuat bagi penduduk desa untuk bekerja. Mereka beranggapan bahwa tenaga mereka memang dibutuhkan. Dengan demikian, maka pada saat itu muncul kelompok buruh bebas yang disebut kuli<sup>38</sup> atau *wong buruh* yang bekerja di perkebunan tebu.<sup>39</sup>

Bagi penduduk desa di sekitar perkebunan, bekerja di perkebunan tebu merupakan alternatif utama. Untuk mengembangkan alternatif lain mereka belum mempunyai sumber daya yang memadai. Usaha penduduk desa yang dapat kelihatan adalah kerajinan anyaman dari bambu.

Secara umum masa-masa sibuk penggunaan buruh adalah antara bulan April sampai Oktober. Pada bulan-bulan itu penanaman tebu pada lahan yang baru mulai dilakukan. Dari tujuh bulan masa sibuk itu, bulan Juni sampai Agustus merupakan masa puncak penggunaan buruh karena bersamaan waktunya dengan musim tebang dan giling. Sementara tanaman yang baru lainnya harus dipersiapkan.

---

<sup>38</sup> Kata kuli berasal dari kata *coolie*, sebuah istilah british India yang berarti pekerja tanpa keahlian. Sudiono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (eds), *Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa Dari Masa ke Masa* (Jakarta: PT Gramedia, 1984), hlm. 23.

<sup>39</sup> Tanto Sukardi, *Perkebunan Tebu di Karesidenan Banyumas 1838-1900* (Yogyakarta: Tesis, tidak diterbitkan, 1996), hlm. 147.

musim tebang dan giling. Sementara tanaman yang baru lainnya harus dipersiapkan.

Para buruh juga datang dari desa-desa lain yang jauh dari lokasi perkebunan dan pabrik gula. Mereka kebanyakan berasal dari golongan petani tak bertanah. Para pemilik tanah sempit umumnya bekerja di kebun sebagai penanam tebu atau perawat tanaman itu.<sup>40</sup>

Kebutuhan tenaga buruh dari waktu ke waktu semakin besar. Desakan ekonomi yang cukup berat dirasakan membuat para wanita dan anak-anak ikut terjun ke dunia perburuhan. Para pengusaha menerima kehadiran mereka karena memang membutuhkan demi kelancaran produksi. Sedangkan upah yang harus diberikan lebih rendah daripada buruh laki-laki yang dewasa. Biasanya wanita mendapat upah setengah dan anak-anak sepertiga dari upah tenaga laki-laki dewasa.<sup>41</sup>

Dengan demikian dapat dilihat bahwa perkebunan tebu (di samping pabrik gula) dipandang menjanjikan pemecahan terhadap kesulitan ekonomi penduduk desa. Bahkan mereka dapat bekerja sepanjang tahun. Hal itu disebabkan oleh tanaman tebu yang mempunyai umur panjang (lebih kurang 15 bulan) dan memerlukan perawatan yang intensif.

## **B. Adanya Sistem Uang Muka**

Kesulitan ekonomi penduduk desa ternyata memberikan jalan baru bagi para pengusaha. Kebutuhan keuangan yang mendesak harus segera mendapat

---

<sup>40</sup> Jan Breman, *Penguasaan Tanah Dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 49.

<sup>41</sup> Suhartono, *op. cit.*, hlm. 111.

pemecahan. Para pengusaha memahami hal itu. Mereka berusaha membantu mengatasinya. Akan tetapi mereka juga sekaligus mencari keuntungan bagi usahanya. Cara yang ditempuh adalah dengan memberikan uang muka atau dalam bahasa Jawa disebut dengan *panjer*.

Jalan itu menjadi mudah ditempuh karena rakyat pribumi terkungkung dalam tradisi yang sudah ada sejak dahulu. Masyarakat Jawa mengenal hubungan *kawula-gusti*. Di dalamnya terkandung konsep *jumbuhing kawula-gusti* atau persatuan rakyat dan raja. Konsep itu tidak hanya menunjuk pada persatuan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga persatuan antara rakyat dan raja.<sup>42</sup>

Di dalam hubungan *kawula-gusti* terdapat kepercayaan bahwa raja sebagai patron dan rakyat sebagai klien. Patron adalah penguasa wilayah sekaligus penguasa politik. Bahkan segala yang ada di wilayah kerajaan adalah miliknya karena ia adalah penjelmaan Tuhan.<sup>43</sup> Kedudukannya sebagai penguasa wilayah diwujudkan dalam pemilikan tanah kerajaan. Di sisi lain rakyat sebagai klien tergantung pada kebijaksanaan patronnya. Rakyat hanya memiliki tenaga kerja untuk mengabdikan. Dari mereka juga dituntut kesetiaan dalam menghormati dan menjunjung kewibawaan raja. Sebaliknya raja berkewajiban untuk melindungi rakyatnya.

Rakyat pribumi juga sudah lama mengenal sistem perinduksemangan. Sistem ini kebanyakan dilakukan oleh para pengusaha Tionghoa.<sup>44</sup> Sistem uang

---

<sup>42</sup> G. Moedjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 82.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>44</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *op. cit.*, hlm. 239.



muka hampir mirip dengan sistem perinduksemangan. Unsur yang ditimbulkan adalah ikatan perhambaan antara penerima dan pemberi. Dari penerima dituntut kesetiaan dan taat pada perjanjian yang telah dibuat. Secara psikologis penerima telah berhutang budi kepada pemberi. Oleh karena itu ia berusaha membalasnya dengan taat pada perjanjian. Sedangkan para pemberi uang muka berhak untuk memperoleh pelayanan dari para penerima. Hak-hak semang juga menjadi kewajiban induk untuk memenuhinya.

Analog dengan kebiasaan baik patron-klien, *kawula-gusti*, maupun perinduksemangan yang sudah lama ada, maka para pengusaha dapat dipandang sebagai patron atau induk baru bagi para buruh. Para pengusaha memberikan sejumlah uang kepada penduduk desa terutama yang sangat membutuhkan dan berminat untuk menjadi buruh. Sambil memberikan uang itu mereka mengadakan perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing.

Uang muka itu biasanya diberikan beberapa hari sebelum buruh itu mulai bekerja. Jumlah uang yang diberikan tidak seluruhnya, akan tetapi hanya sebagian kecil dari upah yang nantinya akan diterima.<sup>45</sup> Sementara keseluruhan upah akan diterima setelah bekerja di perkebunan, yang biasanya diberikan secara harian.

Para buruh sangat bernafsu memperoleh uang tunai dengan segera. Mereka tidak berfikir tentang besar kecilnya upah yang akhirnya akan diterima. Hal itu membuat harga tenaganya menjadi murah. Mereka juga tidak sadar bahwa

---

<sup>45</sup> Suhartono, *op. cit.*, hlm. 114.

kenikmatan yang ditimbulkan oleh uang muka itu hanya bersifat sesaat. Setelah dibelanjakan lenyaplah kenikmatan yang dirasakan.

Akan tetapi banyak pula buruh yang berbuat licik. Perjanjian yang dibuat hanya dilakukan dari mulut ke mulut. Jadi tidak ada bukti secara tertulis apalagi secara hukum. Hal itu membuat para pengusaha mengalami kesulitan. Para penerima uang muka ternyata sering mengingkari perjanjian. Mereka memang belum memiliki kesadaran moral yang tinggi, sehingga tidak tahu bahwa perjanjian harus ditepati. Keinginan untuk memperoleh upah yang lumayan kadang-kadang membuat seorang buruh mau menerima uang muka dari beberapa pengusaha sekaligus. Hal itu menyebabkan paling tidak ada pengusaha yang harus dikorbankan. Bahkan ada pula buruh yang menghilang tanpa satupun perjanjian dengan beberapa pengusaha itu yang ditepati. Para pengusaha banyak dirugikan dengan adanya perbuatan itu.

### C. Peranan Para Kepala Desa

Para kepala desa mempunyai kedudukan yang berarti dalam memperoleh buruh. Hal itu dikarenakan para pengusaha menemui beberapa kesulitan. Untuk mewujudkan sistem tenaga kerja upahan secara bebas, sukarela, dan seluas-luasnya sesaat setelah berlakunya Undang-Undang Gula ternyata masih mengalami kesulitan. Kerja dengan upah memang sudah dikenal sejak masa Sistem Tanam Paksa. Akan tetapi pada masa itu jumlah perkebunan tebu belum sebanyak seperti pada masa liberalisme. Bertambah banyaknya jumlah

perkebunan tebu setelah berkembangnya liberalisme memerlukan buruh yang lebih banyak pula. Di antara para buruh itu tentu terdapat orang-orang baru yang belum mengenal kerja upah berdasarkan kontrak bebas. Transisi agar dapat menjadi suatu hal yang biasa memerlukan waktu yang cukup lama.

Di samping itu penduduk desa masih dibebani wajib kerja untuk umum, wajib kerja untuk para kepala, dan wajib kerja untuk desa. Jadi walaupun ada kesempatan untuk bekerja di perkebunan, tetapi mereka masih terkekang oleh beban-beban tradisional di desanya. Walaupun masalah kerja paksa itu telah dibahas oleh pemerintah sejak kira-kira tahun 1850, tetapi keputusannya memerlukan waktu yang lama. Kerja wajib untuk para kepala baru dihapuskan pada tahun 1882. Sedangkan kedua wajib kerja yang lain dihapuskan secara setapak demi setapak. Hal itu dikarenakan pekerjaan-pekerjaan untuk umum dan untuk desa memang sangat diperlukan. Selain itu pemerintah sendiri masih mengalami kesulitan untuk menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan umum dengan menggunakan tenaga kerja upahan.<sup>46</sup>

Kesulitan lain yang dihadapi oleh para pengusaha adalah berkaitan dengan pemberian uang muka. Seperti telah dijelaskan bahwa banyak para buruh yang ingkar terhadap perjanjian setelah menerima uang muka. Kewajiban yang harus diselesaikan ditinggalkan begitu saja. Kemauan untuk menerima uang muka dari

---

<sup>46</sup> R. Z. Leirissa, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme Dan Kolonialisme di Daerah Istimewa Yogyakarta* ( Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1990 ), hlm. 122.; lihat juga Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium Jilid I* ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992 ), hlm. 332.; Robrt Cribb, *loc. cit.*

beberapa pengusaha sekaligus, semakin mendorong kepada perbuatan itu. Hal tersebut sebenarnya telah terjadi sejak tahun 1850-an.<sup>47</sup>

Dengan demikian para pengusaha merasa dirugikan. Selain kehilangan uang, mereka juga rugi waktu. Mereka harus mencari buruh-buruh yang baru untuk menggantikan buruh-buruh yang menghilang. Pemerintah ternyata tidak mau menerapkan *Poenale Sanctie* seperti di Sumatra pada tahun 1872 guna melindungi para pengusaha dari berbagai penipuan oleh para buruh.

Sesuai dengan prinsip-prinsip liberal, maka para pengusaha tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu mereka berusaha dengan kemampuan sendiri dalam menjalankan usahanya termasuk dalam mencari tenaga kerja. Peluang-peluang yang telah ada di desa dicoba untuk dimanfaatkan.

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu menggugah para pengusaha untuk tetap memberdayakan kebiasaan yang sudah ada di desa. Masyarakat Jawa sudah terbiasa dengan kehidupan secara komunal. Mereka dilingkupi oleh dua macam ikatan yaitu ikatan desa<sup>48</sup> dan ikatan feodal<sup>49</sup> yang ternyata sulit untuk dihilangkan. Keduanya dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperoleh tenaga

---

<sup>47</sup> Suhartono, *Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa, Studi Historis 1950-1900* ( Yogyakarta : Aditya Media , 1995 ). hlm. 83-84.

<sup>48</sup> Ikatan desa adalah dunia kehidupan ekonomi yang sederhana dari penduduk tani yang menghasilkan barang-barang untuk pemuasan langsung kebutuhan sendiri. Di sini rakyat dipimpin dan tunduk dengan rasa hormat kepada seorang kepala desa. Prajudi Atmosudirdjo, *op. cit.*, hlm. 104.

<sup>49</sup> Ikatan feodal adalah hubungan ketaatan antara para bawahan atau rakyat kepada pihak penguasa atau atasan yaitu raja-raja dan para bupati. Sebagai kelanjutan dari perabdian feodal ini di desa terdapat perabdian penduduk desa kepada kepala desa sebagai ikatan vertikal dari ikatan desa. *Ibid.* , hlm. 106.

kerja. Ikatan feodal dimanfaatkan sifat perabdiannya tanpa memaksakan rasa hormat yang kaku dari buruh kepada majikan.

Sementara itu sebagai sarana yang lebih teknis, ikatan desa lebih memberikan keuntungan. Kalau sistem uang muka dianggap sebagai jalan yang baru, maka ikatan desa dianggap sebagai jalan yang lama dalam memperoleh buruh. Anggapan itu memang benar kalau mengingat kembali masa-masa sebelum tahun 1870 khususnya pada masa Sistem Tanam Paksa. Rasa hormat kepada para kepala menyebabkan rakyat tunduk pada tiap perintah.

Kepala desa menjadi jembatan penghubung antara penduduk desa dengan pihak pengusaha. Kedudukannya menjadi strategis karena dapat memisahkan kedua kakinya pada tempat yang berbeda. Satu kaki dipijakkan di atas kepala rakyatnya, sedangkan yang lainnya dipijakkan pada pihak pengusaha. Kepala-kepala desa berperan dalam memberikan informasi tentang identitas para buruh. Identitas itu berupa nama, jenis kelamin, umur, asal desa, termasuk kejujuran yang dimiliki. Selain itu para kepala juga dijadikan saksi dalam mengadakan perjanjian.

Kadang-kadang tindakan para kepala desa sampai berlebihan. Mereka menggunakan paksaan agar rakyatnya mau bekerja di perkebunan atau pabrik gula.<sup>50</sup> Di daerah Mojokerto, Besuki dan Pasuruhan terjadi pengerahan tenaga kerja terutama untuk mengolah tanah perkebunan. Dengan demikian kontrak sedesa yang pada tahun 1863 telah dilarang, ternyata masih digunakan.

---

<sup>50</sup> Uemar Yasuo " Perkebunan Tebu Dan Masyarakat Pedesaan di Jawa " dalam Akira Nagazumi ( peny ), *op. cit.* , hlm. 56.

Sifat setengah memaksa masih diperlukan pada masa transisi menuju dunia buruh upahan yang sebenarnya. Suatu dunia di mana terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli, dalam hal ini buruh dan pengusaha harus dilakukan tanpa perantara. Para pengusaha masih menggunakan kewibawaan kepala desa hingga tahun 1893.<sup>51</sup>

Kepala desa diharapkan sebagai jaminan bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan memuaskan. Maka merekapun diberi bonus untuk bantuan yang telah dilakukan dalam mengatur perjanjian baik untuk tenaga kerja maupun untuk tanah. Jika mereka tidak bekerja sebagaimana mestinya maka akan mendapatkan teguran.<sup>52</sup>

Selain peran yang telah disebutkan di atas, kepala-kepala desa juga juga menjadi perantara dalam hal pengupahan. Demikian juga dalam pemberian uang muka. Jika para pengusaha harus mencari dan memberi uang kepada para buruh seorang demi seorang, maka akan memakan waktu yang cukup lama. Demi efisiensi waktu, biaya, dan tenaga maka uang yang seharusnya diterima oleh sekian banyak buruh diserahkan saja kepada para kepala desa. Uang itu kemudian dibagi-bagikan kepada masing-masing orang sebagai uang muka atau upah kerja.

---

<sup>51</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *op. cit.*, hlm. 240-241.; lihat juga Soehardjo Hatmosoeprobo, "Pabrik-Pabrik Gula di Jawa Pada Abad ke-19" dalam P.J. Suwarno, G. Moedjanto, Soehardjo Hatmosoeprobo, *Sejarah Indonesia Dalam Monografi* (Yogyakarta: Jurusan Sejarah Dan Geografi Sosial IKIP Sanata Dharma, 1980), hlm. 78.

<sup>52</sup> Jan Breman, *op. cit.*, hlm. 43.

Di daerah *Projokejawan* ( Kerajaan ) Surakarta dan Yogyakarta perantara itu dilakukan oleh para *bekel*. *Bekel* adalah abdi kerajaan setingkat kepala desa. Ia mendapat gaji berupa *lungguh* atau *apanage*.

Para *bekel* dan kepala desa sendiri ternyata sering berbuat tidak jujur. Dalam tugasnya itu mereka mencari keuntungan sendiri. Uang yang harus diserahkan kepada para buruh ternyata telah dikurangi untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian tanpa disadari oleh para buruh dan mungkin juga oleh pengusaha, peran para kepala desa dan *bekel* tersebut justru memperkecil penghasilan buruh. Kehadiran para kepala desa dan *bekel* ternyata justru menjadi parasit yang menyerap makanan rakyatnya.

Sampai di sini pembicaraan lebih dilihat dari sudut pandang pihak pengusaha. Oleh karena itu pembicaraan pada bagian selanjutnya akan difokuskan pada aktifitas-aktifitas para buruh.

### **BAB III**

#### **KEHIDUPAN BURUH PERKEBUNAN TEBU**

##### **A. Jenis-Jenis Pekerjaan di Perkebunan Tebu**

Tanaman tebu lebih kurang berumur 15 bulan. Biasanya penanaman dimulai pada bulan April dan berakhir pada bulan Oktober. Pada bulan Juni sampai Agustus bersamaan waktunya dengan puncak penebangan tebu yang ditanam pada periode sebelumnya.

Seperti telah dijelaskan pada bagian pendahuluan bahwa tanaman tebu memerlukan penanganan yang baik dan intensif. Dalam jangka waktu 15 bulan ada semacam tahap-tahap yang harus dilalui. Ini menjadi pekerjaan para buruh. Secara umum tahap itu dapat dibagi menjadi tiga yaitu persiapan lahan dan penanaman, perawatan atau pemeliharaan, dan penebangan.

##### **1. Persiapan Lahan Dan Penanaman**

Tahap ini dimulai pada bulan April. Ketika bulan ini tiba, setelah tanaman padi dipanen, tanah yang akan digunakan untuk tanaman tebu mulai dikerjakan. Pekerjaan pertama adalah pembersihan lahan. Sisa-sisa jerami, akar padi, dan rumput-rumputan segera dibakar. Hasil pembakaran yang berupa abu dapat sekaligus sebagai pupuk. Pekerjaan selanjutnya adalah pembuatan parit-parit untuk saluran air sekaligus dapat membuat bedengan tempat bibit tebu ditanam. Setelah selesai, di lahan itu disebar pupuk pendahuluan berupa amonium

sulfat. Fungsinya adalah untuk menggemburkan tanah. Pupuk itu didiamkan beberapa hari agar lebih meresap ke dalam tanah. Sampai tahap ini memakan waktu kurang lebih dua bulan untuk tiap bau.<sup>53</sup>

Pada permulaan bulan Juni penanaman bibit segera dimulai. Bibit itu berasal dari tebu yang mutunya dianggap baik. Tebu yang telah dipersiapkan dipotong-potong dengan panjang lebih kurang 30 cm menjadi tebu yang siap tanam. Untuk setiap bau diperlukan bibit kira-kira sebanyak 16.000 - 24.000 batang.<sup>54</sup> Semua pekerjaan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan pertanian yang sama seperti yang digunakan para petani untuk mengerjakan sawah mereka. Jadi diperlukan waktu yang cukup lama.

## 2. Perawatan

Setelah penanaman selesai, maka para buruh bekerja untuk merawat atau memelihara tanaman. Hal pertama yang diperhatikan adalah pengaturan saluran irigasi agar tanaman tebu dapat terairi dengan baik. Para pemilik perkebunan memonopoli penggunaan air untuk mengaturnya. Mereka menerapkan jadwal siang-malam. Pada siang hari air digunakan untuk mengairi tanaman tebu, sedangkan untuk malam hari diperuntukkan bagi sawah para petani. Kadang-kadang jadwal itu tidak ditepati oleh para pemilik perkebunan. Mereka mempergunakan air baik siang maupun malam.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Uemura Yasuo, "Perkebunan Tebu Dan Masyarakat Pedesaan di Jawa" dalam Akira Nagazumi ( peny ) *op. cit.*, hlm. 53.

<sup>54</sup> *Ibid.*

Bibit tebu yang telah ditanam tidak semuanya dapat tumbuh. Ada kalanya beberapa bibit kering sebelum tumbuh. Oleh karena itu diperlukan penanaman *sulam* untuk menggantinya. Bahkan yang tumbuhnya tidak begitu baik atau rusak juga harus diganti dengan bibit yang baru.<sup>56</sup>

Sementara itu pemupukan tambahan dilakukan dua atau tiga kali. Untuk menjaga baiknya pertumbuhan tanaman, maka segala rerumputan yang mengganggu dibersihkan. Demikian pula dengan *rapak* atau daun-daun tebu yang sudah kering.

Pada waktu-waktu tertentu pangkal tanaman tebu ditimbun dengan tanah. Para buruh menggunakan cangkul untuk mengerjakannya. Penimbunan itu dilakukan sampai lima kali sesuai dengan pertumbuhan tanaman.<sup>57</sup>

### 3. Penebangan

Tanaman tebu dapat dipanen pada bulan Juni atau Juli sampai Oktober atau November tahun berikutnya. Puncak panen adalah dari bulan Juni sampai Agustus. Sesudah ditebang, tebu segera dibawa ke pabrik. Tebu yang sudah ditebang tidak boleh dibiarkan ditempat yang panas. Hal ini dimaksudkan agar kandungan air gula tidak berkurang. Setelah sampai di pabrik, tebu ditimbang, baru diolah menjadi gula yang dilakukan dengan menggunakan tenaga mesin.

---

<sup>55</sup> Jan Breman, *op. cit.*, hlm. 43.

<sup>56</sup> F. A. Soetjipto, "Pengaruh Onderneming Tebu Pada Kehidupan Masyarakat di Djawa Abad ke-19", *Makalah Seminar Sedjarah Nasional II*, 26-29 Agustus 1970 di Yogyakarta.

<sup>57</sup> Uemura Yasuo, "Perkebunan Tebu Dan Masyarakat Pedesaan di Jawa" dalam Akira Nagazumi ( peny ), *op. cit.*, hlm. 55.

Dalam proses ini buruh wanita dan anak-anak bertugas untuk melengkapi kekurangan tenaga kerja para buruh laki-laki. Mereka membantu pekerjaan memupuk, menanam tebu, menggemburkan tanah, mencabut rumput, mengganti tanaman yang rusak serta membantu dalam penebangan tebu.<sup>58</sup>

Proses pengolahan gula di pabrik sendiri tidak boleh berhenti kecuali waktu beristirahat. Jadi pasokan bahan baku dari perkebunan harus berjalan secara terus menerus. Proses ini sangat tergantung pada penebangan. Maka penebangan tebu juga harus dilakukan terus-menerus.

Pekerjaan-pekerjaan di perkebunan tebu itu tersedia tak putus-putusnya. Apalagi dengan diterapkannya sistem *glebagan*. Sistem itu mengatur dalam penggunaan tanah untuk perkebunan tebu. Pada dasarnya pabrik gula mempergunakan sepertiga dari luas sawah seluruhnya.<sup>59</sup> Setelah tanaman tebu dipanen, tanah yang digunakan untuk penanaman dikembalikan kepada pemiliknya, dan sepertiga lagi yang lainnya diambil untuk perkebunan tebu. Demikianlah seterusnya secara bergilir. Akan tetapi oleh karena tanaman tebu baru biasanya telah ditanam sebelum yang tua dipanen, maka dalam kenyataannya tebu itu menghabiskan rata-rata setengah dari tanah petani.

Dengan sistem tersebut penanaman tebu dapat dilakukan oleh pengusaha hampir setiap tahun pada lahan yang berbeda. Kontinuitas penanaman berarti menjamin pula kontinuitas lapangan pekerjaan bagi para buruh.

---

<sup>58</sup> Bambang Sulistyono, *op. cit.*, hlm. 21.

<sup>59</sup> Mubyarto dkk, *Usaha Tani Tebu Dan Industri Gula di Jawa ( Laporan Survey Agro Ekonomi Indonesia Jilid I Bagian I, 1968 )*, hlm. 5. ; lihat juga Jan Breman, *op. cit.*, hlm. 78.

## B. Terjadinya Mobilitas Penduduk

Sebetulnya terjadinya mobilitas penduduk di sekitar perkebunan lebih tampak sebagai dampak sosial dari perluasan perkebunan. Akan tetapi berhubung para buruh adalah pelaku dari gejala itu, maka dirasa perlu juga diuraikan di sini.

Tersedianya lapangan pekerjaan sepanjang tahun di perkebunan tebu telah merangsang penduduk desa untuk terlibat di dalamnya. Mereka mengharapkan mendapatkan upah yang dapat digunakan untuk meringankan beban ekonomi yang disandangnya. Perkebunan menjadi tumpuan hidup yang baru.

Seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu bahwa banyak buruh yang datang dari desa-desa yang jauh dari lokasi perkebunan. Desa mereka dari perkebunan ada yang berjarak 15-30 pal (1 pal = 1,5 Km) bahkan lebih. Banyak pula buruh-buruh yang datang dari luar karesidenan tempat beradanya perkebunan itu.<sup>60</sup> Hadirnya penduduk desa lain ke suatu tempat secara teoritis berarti telah menimbulkan mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk merupakan salah satu aspek demografi yaitu gerakan penduduk yang melintasi wilayah tertentu dalam periode yang tertentu pula. Hal itu mempunyai pengaruh terhadap perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah.<sup>61</sup>

Mobilitas penduduk dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu mobilitas permanen atau migrasi dan mobilitas non permanen atau mobilitas sirkuler. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan

---

<sup>60</sup> Frans Husken, *Masyarakat Desa Dalam Perubahan Zaman: Sejarah Deferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980* ( Jakarta : PT Gramedia Widiasarana, 1998 ), hlm. 92.

<sup>61</sup> Ida Bagus Mantra, *Pengantar Studi Demografi* ( Yogyakarta : Nur Cahaya, 1985 ), hlm. 151.

maksud menetap di daerah tujuan. Sedangkan mobilitas sirkuler adalah gerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan tidak ada niat untuk menetap di daerah tujuan.<sup>62</sup>

Mobilitas sirkuler di perkebunan tebu paling kelihatan diperankan oleh para buruh wanita dan anak-anak. Mereka direkrut dari daerah yang dekat dengan perkebunan. Jadi walaupun mereka tidak mau kembali ke tempat tinggal, mungkin karena faktor kelelahan, itu tidak akan lama. Terutama wanita karena mereka juga harus mengurus rumah tangga.

Para buruh musiman yang memiliki sawah melakukan perpindahan sementara pada musin tebang dan giling tebu. Kebetulan musim itu bersamaan waktunya dengan puncak musim kemarau. Jadi para petani, terutama yang tidak terjangkau irigasi, tidak dapat mengerjakan sawahnya. Oleh karena itu mereka berusaha menambah penghasilan dengan bekerja sebagai buruh diperkebunan tebu. Ketika musim tebang dan giling selesai, bersamaan pula waktunya dengan datangnya musim penghujan. Maka mereka kembali ke desanya untuk mengerjakan sawahnya.

Pada tahun 1875 pabrik gula di daerah Surakarta mendatangkan kuli dari Jepara, Pekalongan, dan Yogyakarta. Mereka ditempatkan di *los* dan *gubuk* di sekitar perkebunan dan pabrik gula. Untuk membuat kerasan, para buruh itu diberi candu dan minuman keras. Usaha pihak perkebunan itu berhasil karena para buruh menjadi ketagihan dan mau tinggal beberapa lama di tempat tersebut.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

Bahkan di pemukiman-pemukiman buruh timbul praktek prostitusi dan perjudian. Kegiatan itu ternyata sangat menarik bagi para buruh. Namun demikian mereka juga kembali ke tempat asal mereka setelah musim tebang dan giling selesai. Dengan demikian telah kelihatan terjadinya mobilitas sirkuler di daerah perkebunan.

Sebenarnya terjadinya mobilitas penduduk selain disebabkan oleh adanya lapangan pekerjaan di sekitar perkebunan juga disebabkan oleh adanya kesempatan untuk membuka lahan-lahan pertanian baru setelah berlakunya Undang-Undang Agraria. Sebab yang kedua itu paling kelihatan pada tahun 1875 sampai dengan tahun 1885. Akan tetapi setelah tahun 1885 sebab perpindahan penduduk bukan itu lagi melainkan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan perkebunan.<sup>63</sup>

Selain buruh yang tinggal hanya sementara waktu, banyak pula buruh yang melakukan migrasi. Mereka tinggal menetap di sekitar perkebunan. Biasanya buruh-buruh yang berasal dari tempat yang sama tinggal mengelompok di tempat baru yang sama pula. Migrasi itu mengakibatkan tingkat kepadatan penduduk di desa itu menjadi semakin tinggi. Gejala tersebut dapat diamati dari jumlah penduduk dan tingkat kepadatan di kabupaten-kabupaten yang memiliki perkebunan tebu dan pabrik gula. Ternyata tingkat kepadatannya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain yang tidak terdapat perkebunan tebu dan pabrik gula.

---

<sup>63</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *op. cit.*, hlm. 232-233.

Buruh laki-laki yang menjadi kepala keluarga biasanya membawa semua anggota keluarganya untuk menetap di daerah perkebunan. Mereka pada umumnya berasal dari golongan petani yang tidak bertanah. Di desa asalnya mereka hanya mengerjakan sawah milik *kuli kenceng* atau *sikep*.<sup>64</sup> Jadi pilihan untuk tidak kembali ke desanya dirasa paling cocok.

Indikasi bahwa kepadatan penduduk di daerah gula lebih tinggi daripada daerah bukan penghasil gula dapat dilihat dari contoh pada tabel di bawah ini.<sup>65</sup>

Perbandingan Jumlah Dan Tingkat Kepadatan Penduduk

Kabupaten	1880	1890	Perkebunan	Kepadatan
Cilacap	201.751	240.397	bukan	283/ Km <sup>2</sup>
Purwokerto	193.522	254.921	perkebunan	292/ Km <sup>2</sup>
Banyumas	215.783	263.074	perkebunan	515/ Km <sup>2</sup>
Purbalingga	234.469	285.658	perkebunan	514/ Km <sup>2</sup>
Banjarnegara	149.954	190.320	bukan	162/ Km <sup>2</sup>

Dari data tersebut dapat dilihat adanya kecenderungan bahwa penduduk berpusat pada daerah-daerah perkebunan tebu. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah-daerah itu telah terjadi pertambahan penduduk yang cukup berarti. Salah satu sebab yang mungkin berpengaruh adalah telah terjadinya migrasi dari daerah lain ke desa-desa di sekitar perkebunan. Memang tingginya tingkat kelahiran di

<sup>64</sup> *Kuli kenceng* atau *sikep* adalah sebutan untuk sekelompok orang yang memiliki sawah yang bisa diairi. Kelompok ini juga mencakup mereka yang memiliki tanah kering yang mudah ditanami, tapi statusnya berada sedikit di bawah para pemilik tanah sawah. *Kuli kenceng* menempati stratifikasi sosial yang tertinggi dari golongan rakyat jelata. Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, terjemahan (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1986), hlm. 36.

<sup>65</sup> Tanto Sukardi, op. cit., hlm. 149.

satu sisi dan rendahnya tingkat kematian di sisi lain merupakan faktor alamiah yang tidak dapat diabaikan. Akan tetapi jika asumsi yang pertama benar, berarti perkebunan tebu di samping pabrik gula telah dipandang oleh penduduk pedesaan sebagai salah satu sumber penghasilan. Hal itu sangat merangsang mereka untuk pergi dari desanya guna bekerja dan tinggal di daerah perkebunan. Kehadiran mereka tanpa disadari telah membentuk kelompok baru di samping penduduk setempat. Kedua belah pihak itu hidup berdampingan secara damai. Walaupun buruh dari daerah lain itu adalah orang asing, tetapi penduduk setempat bersedia menerima kehadiran mereka dengan tangan terbuka. Persamaan nasib telah membawa mereka kepada sikap persaudaraan untuk bersama-sama memasuki dunia perburuhan.

### **C. Kehidupan Buruh Yang Menderita**

Pergeseran pekerjaan dari petani menjadi buruh bebas bukanlah suatu kebetulan belaka. Akan tetapi keterlibatan mereka di perkebunan dipenuhi dengan segudang harapan. Para petani terutama yang bermukim di sekitar perkebunan tidak dapat mengandalkan hasil pertanian lagi karena adanya sistem *glebagan* dan jadwal siang-malam.

Sistem *glebagan* mengatur pergiliran penanaman antara tanaman pertanian dan tanaman tebu. Akibatnya lahan yang tersedia untuk tanaman pertanian berkurang. Sesuai dengan aturan, lahan yang digunakan untuk tanaman tebu seluas sepertiga dari luas sawah seluruhnya. Para petani semakin dirugikan

oleh pengusaha karena pengembalian *glebagan* sering terlambat ketika pergiliran penanaman yang baru telah dimulai.

Sementara itu jadwal siang-malam juga merugikan petani. Panen yang dihasilkan sering kurang baik karena ketika hidup tanaman kekurangan air. Para pengusaha telah memonopoli penggunaan air itu baik siang maupun malam. Sebenarnya telah diatur bahwa pada malam hari air diperuntukkan bagi tanaman pertanian milik petani. Akan tetapi para pengusaha melanggar aturan itu demi kepentingan usahanya.

Keadaan itu menyebabkan petani tidak dapat berharap banyak dari hasil pertanian. Mereka mencoba mencari jalan lain untuk mencari penghasilan. Sektor perburuhan yang menjadi alternatif pilihan memang terkesan menjanjikan kecerahan bagi kehidupan mereka.

Secara berangsur-angsur kerja bebas semakin dipandang sebagai suatu hal yang biasa. Dalam kondisi demikian tekanan dari para penguasa tradisional bukan lagi merupakan dorongan bagi penduduk desa untuk bekerja. Bagi mereka bekerja di perkebunan tebu bertujuan untuk mencari kesejahteraan. Dari sini tampak jelas bahwa perangsang upah berupa uang lebih dominan artinya untuk mencari buruh daripada perintah para kepala desa.

Meskipun jumlah pabrik gula dan perkebunan tebu semakin bertambah setelah tahun 1870, tetapi dalam kenyataannya lapangan pekerjaan yang tersedia tetap tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang ada. Hal itu disebabkan oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Lapangan kerja di bidang

pertanian juga semakin tidak mampu menampung tenaga kerja secara layak. Akibatnya para pencari kerja nasibnya tergantung kepada pihak pengusaha.<sup>66</sup>

Dalam keadaan demikian posisi para pengusaha jelas lebih menguntungkan daripada para buruh. Hal itu wajar sesuai dengan hukum pasar. Melimpahnya jumlah pencari kerja membuat harga tenaga mereka menjadi rendah. Para pengusaha menjadi lebih leluasa dalam mengeksploitasi para buruh. Eksploitasi itu termanifestasi dalam penggunaan tenaga yaitu dengan memberikan jam kerja yang berlebihan. Demikian pula dalam hal upah kerja dapat ditekan menjadi lebih rendah demi keuntungan sepihak.

Sementara itu uang hasil kerja para buruh yang kemudian beredar menjadi semakin banyak. Hal itu mendorong terjadinya *moneterisasi* di pedesaan. *Moneterisasi* adalah penetapan uang sebagai alat pembayaran yang sah.<sup>67</sup> Segala kebutuhan berusaha dibeli dengan uang. Bahkan barang-barang yang bukan kebutuhan pokok menjadi dikejar. Oleh karena itu penduduk desa semakin membutuhkan uang tunai. Mereka semakin bernaflu untuk mengejar uang sehingga menjadi tergantung kepada pihak pengusaha.

Telah pula diuraikan pada bab terdahulu bahwa para buruh dirangsang dengan uang muka. Dengan sendirinya dan tanpa disadari adanya nafsu untuk memperoleh uang muka itu membuat standar upah menjadi rendah. Pada akhirnya

---

<sup>66</sup> Tanto Sukardi, *op. cit.*, hlm. 159.

<sup>67</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 992.

setelah mereka bekerja upah yang diterima juga hanya sebagian karena dikurangi oleh uang muka yang telah diterima.<sup>68</sup>

Untuk mengetahui seberapa jauh kesejahteraan buruh setelah bekerja di perkebunan harus dilihat besarnya upah yang diterima. Upah itu kemudian dibagi-bagi dalam pembelanjaan kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Harus diakui bahwa upah buruh untuk tiap-tiap daerah di Jawa jumlahnya berbeda-beda. Akan tetapi berdasarkan data-data yang diperoleh, penulis mencoba menarik benang merah untuk menuju suatu generalisasi dalam lingkup yang lebih besar yaitu di Jawa.

Dalam *Indonesia Menggugat*, Bung Karno yang mengutip dari *Statistisch Jaaroverzicht* menyebutkan kembali bahwa upah buruh hanya f 0,45 sehari bagi orang laki-laki dan f 0,35 sehari bagi perempuan (f 1= 100 sen). Jadi jika disenkan upah buruh itu sebesar 45 sen untuk laki-laki dan 35 sen untuk perempuan. Upah itu dianggap sebagai upah terendah yang diterima untuk mencegah maut. Di Yogyakarta upah buruh berkisar antara 25 sampai 30 sen per hari. Di Surakarta jumlahnya lebih tinggi yaitu berkisar antara 30 sampai 60 sen per hari. Sementara itu upah di afdeling-afdeling Jawa Timur antara 35 sampai 40 sen per hari untuk laki-laki, 20 sampai 30 sen untuk buruh wanita, dan untuk anak-anak maksimal 15 sen.<sup>69</sup> Dengan demikian upah standar untuk buruh laki-

---

<sup>68</sup> G. Gonggrijp, *op. cit.*, hlm. 130.

<sup>69</sup> Bung Karno, *Indonesia Menggugat* (Jakarta: S.K. Seno, 1956), hlm. 59.; lihat juga R.Z. Leirissa, *op. cit.*, hlm. 133.; suhartono, *op. cit.*, 1991, hlm. 110.; Uemura Yasuo, "Perkebunan Tebu Dan Masyarakat Pedesaan di Jawa" dalam Akira nagazumi (peny), *op. cit.*, hlm. 56.

laki dewasa rata-rata sekitar 34 sampai 43 sen per hari. Di sini diambil buruh laki-laki karena ia adalah kepala keluarga dan diasumsikan bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga.

Pembelanjaan sehari-hari dari upah itu dapat dirinci dari kebutuhan setiap *sikep* dan *kuli kenceng*. Untuk satu *cacah* (keluarga) misalnya, yang terdiri atas ayah, ibu, dan 3 orang anak memerlukan 3 cangkir beras setiap hari (1 cangkir beras, 150 gram, seharga 1,5 sen), gula aren 2,5 sen, tembakau 5 sen, gambir 1,5 sen, oncom 1,5 sen, cabai 1 sen, dan pakaian dihitung kira-kira 20 sen. Kebutuhan sehari semuanya berjumlah 34 sen. Kebutuhan lain seperti garam atau bumbu-bumbu masak yang lain, candu, dan minuman keras belum dihitung dan diperkirakan lebih dari 10 sen. Dengan demikian upah kerja sehari itu tidak cukup untuk menghidupi satu *cacah*.<sup>70</sup> Di sini kebutuhan buruh sengaja dirinci seperti kebutuhan *sikep* dan *kuli kenceng*. Hal itu dikarenakan kehidupan mereka dianggap sebagai standar atau tolok ukur hidup yang sejahtera.

Pembelanjaan uang itu masih harus ditambah lagi dengan kewajiban-kewajiban lain. Kewajiban itu seperti pembayaran pajak, pungutan dan sumbangan sosial, anggaran belanja untuk keperluan yang bersifat insidental misalnya penyelenggaraan pesta keluarga, dan kebutuhan-kebutuhan tak terduga yang lain. Dana tersebut tidak termasuk dalam anggaran kebutuhan sehari-hari. Kewajiban pembayaran itu biasanya dicukupi melalui penjualan ternak atau

---

<sup>70</sup> Suhartono, *op. cit.*, 1995, hlm. 87.

dengan cara hutang. Dalam kenyataannya, dana untuk memenuhi kebutuhan semacam itu jarang sekali diperoleh dengan cara menabung

Untuk beban pajak, selain pajak tanah ada juga “uang kepala” yang mulai diadakan sejak tahun 1882. Uang itu digunakan sebagai pengganti sebagian dari kerja rodi yang dilakukan oleh penduduk desa. Uang yang harus dibayarkan oleh setiap pekerja wajib (lelaki yang sudah dewasa) sebesar 1 gulden.<sup>71</sup>

Penerimaan upah oleh para buruh memang menyebabkan peredaran uang di pedesaan semakin meluas. Tetapi kenyataannya mereka hanyalah menerima uang fiktif.<sup>72</sup> Hal itu disebabkan oleh banyaknya barang-barang konsumtif dan berbagai kenikmatan yang menguras keuangan. Di desa-desa banyak beroperasi Cina klontong yang menjual barang-barang kebutuhan penduduk dengan cara kredit atau *mindring*. Barang-barang itu meliputi kain, cita, garam, bumbu dapur, minuman keras, dan candu gelap. Di sekitar pabrik dan perkebunan juga terdapat penjual candu dan minuman keras tempat para buruh mengkonsumsi upahnya. Bahkan tidak jarang terdapat praktek prostitusi dan perjudian. Kedua hal itu merupakan kenikmatan yang membuat para buruh ketagihan sehingga hampir dilakukan tiap malam.

Di samping itu masih banyak lagi lintah darat yang menguras upah penduduk. Selain para rentenir Tionghoa dan Arab, juga orang-orang pribumi yang kaya dan kepala-kepala desa. Rendahnya upah di satu pihak dan kesukaan

---

<sup>71</sup> Frans Husken, *op. cit.*, hlm. 93.; lihat juga J.S. Furnivall, *op. cit.*, hlm. 185.

<sup>72</sup> Suhartono, *op. cit.*, 1995, hlm. 89.

pada barang-barang konsumtif dan berbagai kenikmatan membuat para buruh terjerat hutang. Pada musim tebang dan giling banyak pedagang makanan dan minuman berkeliling mengikuti penebang tebu. Pedagang itu menyediakan makan bagi para buruh baik untuk makan pagi, makan siang, maupun makan sore. Bahkan menyediakan pula makanan-makanan kecil selain nasi. Kehadiran mereka tidak terpancang pada satu lokasi. Ketika satu perkebunan selesai dikerjakan dan para buruh pindah ke lokasi yang lain, pedagang itu ikut pula pindah. Hampir lima bulan mereka berpindah-pindah dari satu desa ke desa yang lain untuk menyerap upah buruh.

Para pengusaha sengaja membiarkan adanya praktek-praktek tersebut karena memiliki maksud-maksud tertentu. Para buruh yang tertarik pada berbagai hal di luar kebutuhan pokok menjadi butuh uang. Apalagi bagi mereka yang terlilit hutang. Dengan demikian berapapun upah yang diberikan oleh pihak perkebunan akan diterima oleh mereka.

Upah yang diterima para buruh tersebut memang relatif kecil. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja ternyata hanya pas-pasan. Untuk satu *cacah* (keluarga) memerlukan biaya 34 sen tiap hari. Sementara upah yang diterima oleh kepala keluarga hanya 34-43 sen tiap hari. Kebutuhan sehari-hari buruh memang dapat ditekan menjadi lebih rendah. Akan tetapi konteks pembahasan ini berkisar pada kesejahteraan. Jadi, kebutuhan itu tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan *sikep* dan *kuli kenceng* sebagai tolok ukur kesejahteraan. Para pengusaha enggan menaikkan upah demi kepentingan sendiri. Dengan demikian dapat dilihat bahwa keadaan para buruh tidak sejahtera.

Setelah tahun 1880 upah buruh di beberapa daerah mengalami penurunan. Beberapa afdeling di Jawa Timur menurunkan upah menjadi 20 sampai 40 sen per hari untuk buruh laki-laki, 15 sampai 20 sen untuk buruh wanita, dan 10 sampai 15 sen untuk anak-anak. Penurunan upah itu disebabkan oleh jatuhnya harga gula di pasaran.

Sekitar tahun 1882 industri gula mengalami krisis. Pada tahun itu ditemukan penyakit *sereh* yang menyerang tanaman tebu di Jawa sehingga banyak perkebunan tebu mengalami gagal panen atau panen dengan mutu rendah. Hal itu menyebabkan kualitas gula yang dihasilkan juga rendah sehingga tidak diminati oleh pasaran luar negeri. Selain itu produksi gula beet sangat melimpah sehingga stok gula di seluruh dunia menumpuk. Hal itu menyebabkan harga gula turun secara drastis. Furnivall memberi contoh gula No. 14 pada tahun 1877 seharga *f* 19 per pikul. Pada tahun 1883 harga itu turun menjadi *f* 13,5, dan pada tahun 1884 turun lagi menjadi *f* 9 per pikul.<sup>73</sup>

Para pengusaha tidak mau menanggung resiko kerugian. Untuk tetap menjaga keuntungan, mereka berusaha menekan biaya produksi. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menurunkan upah buruh. Dengan demikian kehidupan buruh semakin bertambah sulit karena harus menanggung krisis yang terjadi.

#### **D. Belum Berkembangnya Organisasi Buruh**

Kedaaan hidup para buruh ternyata kekurangan. Kehidupan sehari-hari terbelenggu oleh minimnya penghasilan yang diperoleh. Para pengusaha sendiri

---

<sup>73</sup> J.S. Furnivall, *op. cit.*, hlm. 196.

tidak mau berinisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan para buruhnya. Saluran-saluran untuk menyampaikan keinginan buruh belum ada. Para kepala desa yang memimpin mereka dan ikut dalam perekrutan buruh bermuka dua. Dalam posisi tersebut para kepala desa tidak mau kehilangan keuntungan pribadinya. Peran yang dimainkan justru lebih menguntungkan para pengusaha daripada rakyatnya sendiri.

Sementara itu serikat buruh belum ada. Menurut *The History of Trade Unionism* yang dikutip oleh A. Madjid Siregar, serikat buruh atau serikat sekerja adalah suatu persekutuan kekal antara pekerja-pekerja yang menerima upah (*wage earners*) yang bertujuan mempertahankan dan memperbaiki syarat-syarat kerja.<sup>74</sup>

Menurut N. Barou dalam bukunya *British Trade Union*, tujuan serikat buruh adalah sebagai berikut:

1. Memelihara dan memperbaiki syarat-syarat perburuhan dengan jalan mengatur hubungan kerja dengan pihak pengusaha.
2. Mengatur hubungan kerja antara pemerintah dan pekerja yang menerima upah atau gaji tentang hal-hal yang meliputi kepentingan kedua belah pihak.
3. Mengusahakan agar pekerja-pekerja yang menerima upah atau gaji sebagai suatu golongan yang tersusun, turut serta dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> A. Madjid Siregar, *Perkembangan Serikat Buruh di beberapa Negara* (Djakarta: Pustaka Rakjat N.V., 1953), hlm. 7.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 8.



Dengan melihat berbagai tujuan tersebut, maka sebenarnya perlulah untuk membentuk sebuah serikat sekerja yaitu serikat buruh. Jika dicermati, di negeri Belanda sendiri organisasi semacam itu sudah berdiri sejak tahun 1861. Dengan demikian para pengusaha telah memiliki pengalaman guna diterapkan di Hindia. Akan tetapi di Jawa saja yang jumlah buruhnya lebih besar daripada daerah lain ternyata organisasi itu belum dapat tumbuh. Meskipun demikian pada tahun 1882 pernah terjadi pemogokan buruh pabrik gula di Yogyakarta. Kasus itu unik, maka perlu diberi ulasan tersendiri.

Tidak dapat dipungkiri bahwa belum berkembangnya organisasi itu dikarenakan belum adanya faktor-faktor pendukung. Pada masa itu belum ada seorang pemimpin yang menjadi pelopor.<sup>76</sup> Selain itu para buruh masih sangat bodoh. Penduduk Jawa sebagian besar buta huruf. Pendidikan untuk penduduk pribumi hanya dikenyam oleh sebagian kecil golongan priyayi. Mereka dipersiapkan untuk bekerja sebagai pegawai di kantor-kantor pemerintah.<sup>77</sup> Oleh karena itu sebagian besar bahkan dapat dikatakan semua buruh pribumi hanyalah tenaga kerja yang tidak memiliki latar belakang pendidikan. Dalam fikiran mereka belum ada kemampuan untuk mendirikan sebuah organisasi modern seperti yang telah ada di Eropa.

Demikian pula belum ada perkumpulan-perkumpulan politik atau organisasi kebangsaan yang menggugah fikiran kaum buruh agar menjadi lebih

---

<sup>76</sup> Sandra, *Sedjarah Pergerakan Buruh di Indonesia* (Djakarta: P.T. Pustaka Rakjat, 1961), hlm. 12.

<sup>77</sup> E.S. de Klerck, *History of The Netherlands East Indies* (Rotterdam: W.L. and J. Brusse N.V., 1938), hlm. 227.; lihat juga J.S. Furnivall, *op. cit.*, hlm. 219-221.

terbuka untuk berorganisasi. Belum adanya organisasi kebangsaan berarti juga belum ada yang menggalang buruh untuk dijadikan basis massa. Oleh karena itu organisasi buruh dengan pengertian sebagai penentang kekuasaan majikan belum ada.

Telah disebutkan bahwa para pengusaha sendiri tidak mau berinisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan buruh apalagi memunculkan ide pembentukan serikat buruh. Alasan yang muncul dan realistis adalah apabila terbentuk suatu serikat buruh, maka para buruh mendapat saluran guna menuntut hak-hak yang lebih besar lagi daripada yang telah diterima. Apabila itu terjadi berarti keuntungan yang akan diperoleh para pengusaha akan berkurang.

Para pengusaha lebih mengetahui dan memperhatikan kekuatan persatuan untuk memaksakan kemauan mereka berdasarkan pengalaman-pengalaman yang diperolehnya di Eropa. Oleh karena itu yang lebih dulu berdiri di Hindia Belanda adalah justru organisasi majikan, bukan organisasi buruh.<sup>78</sup> Untuk dapat merealisasikan keinginan para pengusaha, maka di dalam perusahaan gula terdapat sindikat bersama para pemilik pabrik gula Hindia Belanda. Sindikat itu mempunyai program untuk mencari keuntungan dan bukan untuk memajukan kepentingan-kepentingan penduduk pribumi.<sup>79</sup>

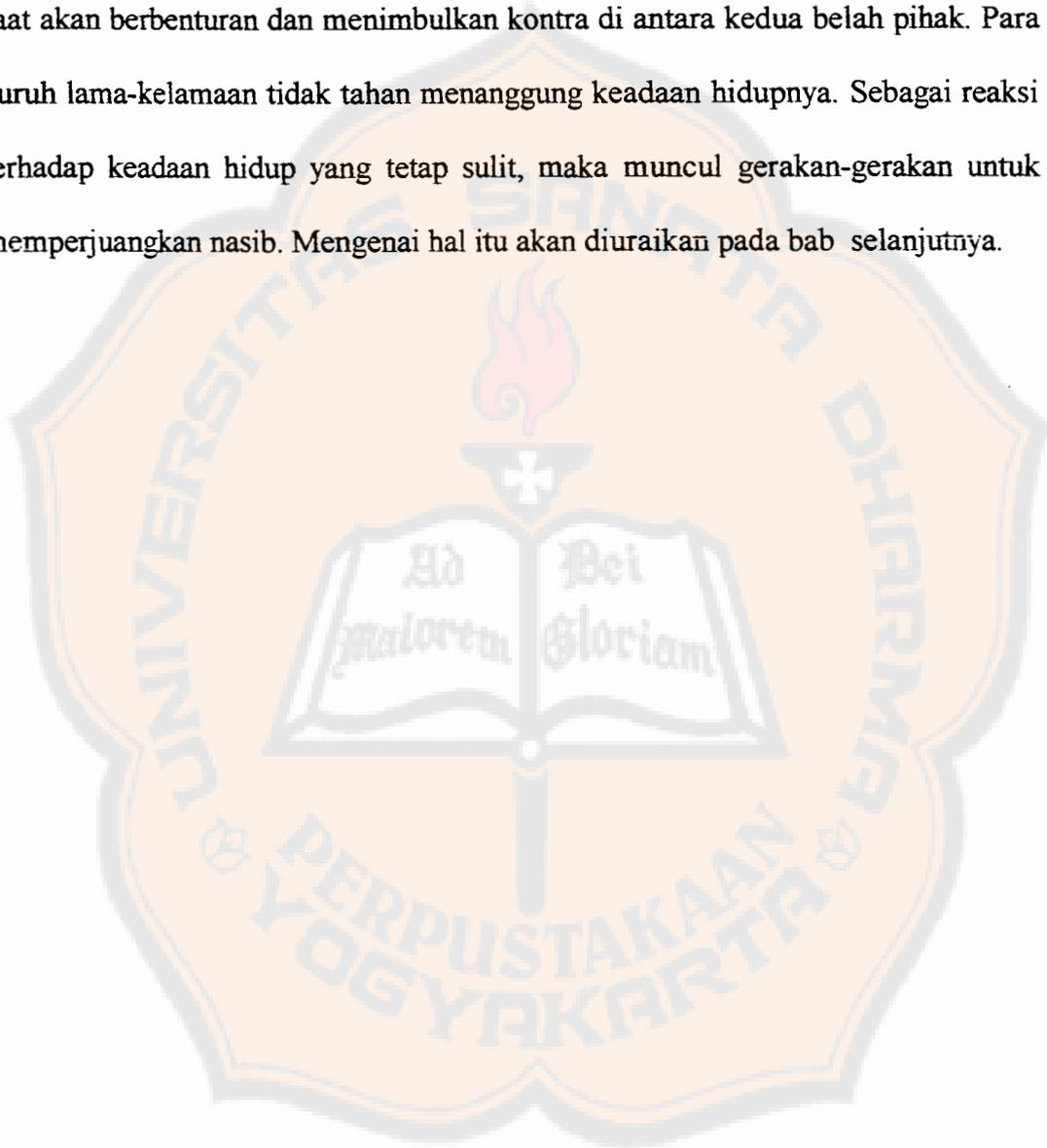
Dengan demikian keadaan hidup para buruh yang kurang sejahtera nyaris tidak berubah sampai akhir liberalisme sepanjang mereka menyandarkan inisiatif

---

<sup>78</sup> A. Madjid Siregar, *op. cit.*, hlm. 63.

<sup>79</sup> Selo Soemardjan, *op. cit.*, hlm. 216-217.

pada pengusaha. Antara buruh dan pengusaha memang memiliki kepentingan yang dapat dikatakan berseberangan. Walaupun demikian bukan berarti buruh tidak ingin kehidupannya lebih baik. Kedua kepentingan yang berbeda itu suatu saat akan berbenturan dan menimbulkan kontra di antara kedua belah pihak. Para buruh lama-kelamaan tidak tahan menanggung keadaan hidupnya. Sebagai reaksi terhadap keadaan hidup yang tetap sulit, maka muncul gerakan-gerakan untuk memperjuangkan nasib. Mengenai hal itu akan diuraikan pada bab selanjutnya.



## BAB IV

### PERJUANGAN BURUH UNTUK MEMPERBAIKI NASIB

#### A. Gerakan-Gerakan Kontra Eksploitatif

Pada bab terdahulu telah dijelaskan tentang keadaan buruh di perkebunan tebu. Ternyata kehidupan mereka menderita. Sebenarnya mereka tidak akan terlalu berkekurangan jika saja mau bertahan dalam kesederhanaan, artinya hanya mengutamakan kebutuhan pokok. Upah yang diterima hampir impas dengan kebutuhan setiap hari pula. Akan tetapi mereka sangat konsumtifisme dan suka akan kenikmatan jasmani. Selain itu mereka juga harus menanggung kewajiban-kewajiban lain seperti pajak, pasumbang sosial, dan kebutuhan-kebutuhan tak terduga yang lain.

Nasib buruh yang tidak sejahtera seperti yang didengungkan oleh orang-orang liberal sulit diubah karena tidak ada wadah yang memperjuangkan. Para buruh sebenarnya ingin perubahan nasib tetapi pengusaha tidak menginginkan. Perbedaan kedua kepentingan itu suatu saat akan berbenturan dan akan menimbulkan kontra antara keduanya.

Dalam Periode liberalisme gejolak-gejolak sosial timbul akibat adanya eksploitasi pihak pengusaha terutama pengusaha perkebunan. Gejolak-gejolak itu bersifat umum, artinya tidak hanya dilakukan oleh buruh tetapi juga oleh petani dan tokoh-tokoh agama.

Dilihat dari segi kausalitas, masing-masing pihak memiliki sebab yang berbeda. Para petani menganggap para pengusaha telah merugikan mereka karena

tanah-tanah yang subur dipergunakan untuk perkebunan. Sementara itu para buruh mengeluh karena upah yang diterima tidak sebanding dengan tenaga yang telah dikeluarkan. Para pemuka agama menganggap para pengusaha sebagai perusak status quo lingkungan pedesaan.

Gerakan yang bersifat sosial keagamaan dipelopori oleh tokoh agama yang menjadi elite pedesaan. Ideologi yang didengungkan adalah:

1. *Mesianisme* yaitu kepercayaan akan datangnya Ratu Adil.
2. *Nativisme* atau *Kepribumian* yaitu keinginan untuk menciptakan keadaan tenteram seperti sebelum datangnya orang asing.
3. *Revivalisme* yaitu inginan untuk menghidupkan kembali ajaran agama agar orang-orang lebih rajin menjalankan kewajiban agamanya.
4. *Milenarisme* yaitu kepercayaan akan datangnya jaman keemasan yang damai dan sejahtera.
5. *Gagasan perang suci*, Ideologi ini juga disebut dengan perang sabil atau jihat yaitu perang untuk menangkai pengaruh-pengaruh asing guna membela agama.<sup>80</sup>

Gerakan yang bercorak Ratu Adil adalah ancaman yang paling potensial bagi kekuatan kolonial.<sup>81</sup> Perjuangan yang dilakukan kebanyakan bersifat radikal. Ideologi itu menolak secara menyeluruh tertib sosial yang berlaku dan bermusuhan dengan golongan yang memiliki hak istimewa dan yang berkuasa.

---

<sup>80</sup> Sartono Kartodirdjo, *Ratu Adil* ( Jakarta: Sinar Harapan, 1984 ), hlm. 55-63.; lihat juga Suhartono, *op. cit.*, 1991, hlm. 144-152.

<sup>81</sup> Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. 10.

Pemuka-pemuka agama mengembangkan dan menyebarkan visi tersebut serta memberikan bentuk yang mudah diterima oleh golongan awam. Mereka menjadi pemimpin dengan menarik massa rakyat agar berontak.<sup>82</sup>

Para pemimpin gerakan mengaku telah diilhami oleh wahyu. Mereka adalah sang guru, dukun, atau utusan Mesias yang mampu mengajarkan *magico-mysticism* (ngelmu). Ngelmu itu ada yang bersifat rohani dan ada yang bersifat jasmani.

Para petani dan buruh mencoba mengobati luka-luka batin dengan mengalihkan perhatian ke dunia yang bersifat religius. Siraman-siraman rohani yang diberikan oleh para tokoh agama diharapkan dapat menyejukan gejolak jiwa mereka. Selain itu banyak pula yang lari kepada jimat, ilmu gaib, dan kedigjayaan. Jalan yang dipilih itu tidak berhasil selama eksploitor-eksploitor asing masih beraksi.

Dari segi sasaran, yang dituju juga luas. Bukan hanya perkebunan tebu tetapi juga perkebunan yang lain, para mandor, bahkan para *bekel*. Pihak-pihak tersebut dianggap sebagai biang keladi kemiskinan petani.

Perkebunan tebu dianggap paling merugikan karena menggunakan tanah-tanah petani yang subur. Selain itu para pengusaha sering terlambat dalam mengembalikan *glebagan* kepada petani. Keterlambatan itu mengakibatkan para petani rugi waktu lima bulan dalam setiap musim tanam. Akibat yang harus ditanggung adalah resiko gagal panen. Pengembalian *glebagan* itu masih dalam

---

<sup>82</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pemherontakan Petani Banten 1888*, terjemahan ( Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1984 ), hlm. 16.

bentuk tanah yang tidak rata, banyak batang tebu, *tunggak* tebu, dan *rapak* yang berserakan di sawah.<sup>83</sup> Untuk mengolah menjadi lahan yang siap tanam untuk padi diperlukan waktu berhari-hari. Belum lagi keterbatasan petani pada alat pertanian yang digunakan. Walaupun untuk keterlambatan itu para pemilik perkebunan memberikan ganti rugi tetapi uang itu tidak cukup untuk biaya hidup selama lima bulan.

Ketidakpuasan petani terhadap perkebunan tebu dilampiaskan dengan membakar kebun-kebun tebu.<sup>84</sup> Di Yogyakarta selain membakar kebun tebu, aksi juga dilakukan dengan memakan tebu yang telah dipanen, bahkan ada yang melakukan pelemparan dengan batu terhadap mesin pabrik. Hal itu dilakukan sebagai protes terhadap pengusaha. Selain itu ada juga yang bertujuan agar pengusaha mengalami kerugian lebih besar daripada kerugian yang dialami oleh petani. Jadi dapat dikatakan sebagai aksi balas dendam.

Manifestasi lain terhadap ketidakpuasan rakyat pribumi disalurkan dengan mengganggu keamanan. Mereka melakukan tindak kriminal yaitu pengecuan, pencurian, dan perampokan. Para buruh yang sebagian besar juga petani ikut melibatkan diri pada aksi-aksi itu. Mereka bertujuan untuk memperoleh uang dengan jalan pintas karena kekurangan biaya hidup.

---

<sup>83</sup> Purwanto, *Pemogokan Buruh Tebu di Yogyakarta Pada Tahun 1882 ( Studi Gerakan Sosial )* (Yogyakarta: Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Skripsi, tidak diterbitkan, 1987 ), hlm. 31-32.

<sup>84</sup> Untuk contoh-contoh kasus pembakaran kebun tebu dapat dibaca misalnya dalam R.E. Elson, *Javanese Peasant And The Colonial Sugar Industry* ( Singapura: Oxford University Press, 1984 ), hlm. 221.

Semua gerakan yang timbul tersebut merupakan wujud ketidakpuasan rakyat pribumi terhadap patron-patron baru yang bersifat eksploitatif. Demikian pula sebagai reaksi terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi.

Gambaran di atas memang terlalu umum dan jika dibahas tentu akan keluar dari topik yang dibahas. Hal itu penulis tampilkan untuk menunjukkan bahwa pada masa politik kolonial baru ada usaha rakyat pribumi untuk memperbaiki nasib. Selain itu penulis ingin mengantarkan pembaca pada bagian selanjutnya yang merupakan perjuangan yang bersifat khusus.

### **B. Perjuangan Murni Dari Buruh Perkebunan Tebu / Pabrik Gula**

Untuk melihat bagaimana perjuangan yang murni dilakukan oleh buruh tebu, dapat dilihat dalam kasus yang terjadi di Yogyakarta. Usaha para buruh itu dilakukan pada tahun 1882.

Keadaan buruh di Yogyakarta hampir sama dengan keadaan buruh di tempat-tempat lain, bahkan lebih menderita. Di daerah ini upah buruh lebih rendah dari upah buruh di daerah lain. Kalau di Surakarta yang sama-sama daerah *vorstenlanden* upah buruh sebesar 30-60 sen per hari, maka di Yogyakarta hanya 25-30 sen per hari. Sampai dengan tahun 1881 upah itu tidak meningkat.

Para *bekel* dan mandor yang menjadi atasan mereka sering berbuat licik untuk kepentingan pribadi. Mereka mengambil atau mengurangi upah yang seharusnya diterima oleh para buruh. Bahkan para mandor sering melakukan pemukulan terhadap buruh yang melakukan kesalahan.

Kehidupan buruh yang juga sebagai petani yang secara ekonomis menderita itu masih diperberat dengan adanya kerja wajib. Kerja wajib itu adalah:

1. Kerja wajib gugur gunung yang dilakukan untuk menanggulangi bencana alam, malapetaka, atau pekerjaan lain yang membutuhkan penyelesaian dengan cepat. Pekerjaan itu pada masa pemerintahan *patuh* dilakukan sekali dalam 35 hari. Akan tetapi setelah para pengusaha yang berkuasa, kerja wajib itu dilaksanakan sekali dalam seminggu.<sup>85</sup>
2. Kerja wajib ronda malam yang dilaksanakan untuk menjaga perkebunan, barang-barang berharga, atau pekarangan milik penguasa. Kerja itu dilakukan lima malam dalam satu minggu. Selama empat malam untuk perusahaan gula dan semalam untuk desa.<sup>86</sup>
3. Kerja wajib *krigan* (*kerigan*) dilakukan untuk kepentingan umum seperti perbaikan saluran air, jalan, dan jembatan. Pada masa liberalisme pekerjaan itu dilakukan dua kali dalam satu minggu.<sup>87</sup>

Selain beban-beban tersebut, para buruh petani juga harus menanggung beban kerja di perkebunan dan tidak dibayar. Padahal kerja itu dilakukan diluar kerja wajib. Pekerjaan-pekerjaan itu seperti mengangkut tebu ke lori (kereta pengangkut tebu), pengangkutan *rapak* ( daun tebu ) ke jalan, dan pembuatan pagar untuk melindungi tebu dari hewan atau pencuri.

---

<sup>85</sup> Purwanto, *op. cit.*, hlm. 35.

<sup>86</sup> Selo Soemardjan, *op. cit.*, hlm.224.

<sup>87</sup> *Ibid.*

Seperti telah dijelaskan bahwa pihak pengusaha sering terlambat dalam mengembalikan *glebagan* kepada petani. Demikian pula di Yogyakarta para petani yang juga sebagai buruh perkebunan mengalami hal yang sama. Akibat yang ditanggung juga sama yaitu resiko gagal panen.

Secara khusus beban kerja diperberat pada awal bulan Juli 1882. Hal itu disebabkan oleh adanya hujan lebat yang menyebabkan keterlambatan dalam produksi dan penanaman. Untuk mengejar keterlambatan, para pengusaha memaksa para buruh untuk bekerja lebih keras lagi. Mereka tidak boleh datang terlambat. Kalau terlambat harus dihukum yaitu bekerja dua kali lipat dari ketentuan.<sup>88</sup> Hal itu sangat menambah penderitaan buruh tani di Yogyakarta.

Dari perspektif leberalisme terlihat bahwa angan-angan golongan liberal tidak dapat terwujud di daerah ini. Keinginan untuk menyejahterakan penduduk pribumi ternyata gagal. Kerja wajib yang secara teoritis harus dihapuskan ternyata tetap berlaku. Kontrak kerja yang seharusnya menguntungkan keduanya ternyata hanya menguntungkan pihak pengusaha saja. Para buruh selalu dirugikan dalam berbagai bentuk kegiatan.

Keadaan hidup yang menderita menimbulkan luka batin yang mendalam. Hal itu akhirnya menimbulkan reaksi dari para buruh. Mereka ingin mengubah nasib dengan meningkatkan derajat kehidupan.

Karena wadah yang menyalurkan aspirasi seperti organisasi buruh belum ada, maka perjuangan dilakukan dengan cara yang lain. Cara yang ditempuh

---

<sup>88</sup> R. Z. Leirissa, *op. cit.*, hlm. 134.

adalah dengan melakukan pemogokan. Para buruh menuntut kenaikan upah kerja dan keringanan beban kerja. Tuntutan itu berlaku umum di setiap lokasi pemogokan di seluruh Yogyakarta.

Di sini tidak akan dijelaskan mengenai proses pemogokan itu tahap demi tahap karena yang dipentingkan di sini bukan proses secara khusus. Akan tetapi yang dipentingkan adalah cara perjuangan yang ditempuh. Untuk melihat proses yang rinci diperlukan bidang penelitian tersendiri.

Pemogokan buruh tebu di Yogyakarta berlangsung dalam tiga gelombang. Gelombang pertama dimulai pada awal minggu terakhir bulan Juli 1882 dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1882. Gelombang kedua berlangsung dari tanggal 5 Agustus 1882 hingga 22 Agustus. Sedangkan gelombang ketiga berlangsung dari tanggal 23 Agustus hingga pertengahan bulan Oktober 1882. Untuk pabrik dan perkebunan yang terlibat dalam pemogokan dalam masing-masing gelombang dapat dilihat pada lampiran 4.

Aksi-aksi lain yang menyertai perjuangan itu juga dilakukan oleh para buruh. Mereka mendatangi dan merusak rumah beberapa pengawas Belanda yaitu Kersch, Smith, dan Breece W. J. De Reevert de Wildt. Aksi pelemparan terhadap mesin penggiling tebu juga terjadi. Selain itu pembakaran kebun tebu juga terjadi. Dalam long march dari perkebunan tebu Plered ( Kalasan ) para pemogok melakukan pengrusakan kebun tebu yang dijumpai, melempari rumah-rumah pengawas, dan mengacung-acungkan benda-benda tajam. Mereka hendak menuju Yogyakarta untuk menemui patih Danurejo untuk menyampaikan tuntutan.

Rupanya perasaan senasib sepenanggungan telah tertanam dalam benak para buruh. Mereka merasakan penderitaan bersama-sama sebagai pihak yang menanggung akibat dari praktek-praktek eksploitasi. Hal itu diwujudkan pada solidaritas dan kebersamaan buruh dalam melakukan aksi mogok walau di tempat yang berbeda dan berjauhan.

Dalam perjuangan itu ternyata para buruh juga mempertaruhkan nyawa. Mereka tidak gentar terhadap pasukan-pasukan yang menghalau. Dalam aksi yang dilakukan oleh para buruh perkebunan Plered jatuh korban lima orang tewas dan beberapa mengalami luka-luka. Demikian pula korban luka-luka juga terjadi di pabrik gula Ganjuran akibat tembakan pengawas. Ternyata resiko apapun berani diambil demi solidaritas dan hak-hak mereka yang dicaplok oleh mulut-mulut asing.

Sikap paternalistik juga terlihat dalam aksi-aksi tersebut. Para buruh memiliki penguasa tradisional yaitu bupati. Oleh karena itu mereka berusaha memecahkan permasalahan yang ada pada bupati.<sup>89</sup> Akan tetapi bupati itu tidak mau terlibat dalam keluhan rakyatnya. Ia tidak mau memperjuangkan dan menyalurkan tuntutan rakyatnya kepada Patih Danurejo sebagai orang yang mempunyai wewenang. Ia hanya menunjukkan saja bahwa pihak yang berwenang memutuskan adalah patih Danurejo. Para buruh tidak putus asa. Mereka bergerak sendiri untuk melanjutkan perjuangan.

---

<sup>89</sup> Para buruh di Bantul mengadu kepada bupati Bantul Raden Tumenggung Surio Kusumo, sedangkan para buruh di wilayah Kalasan mengadu kepada Raden Tumenggung Sosrodipuro. Djoko Utomo "Pemogokan Buruh Tani di Abad ke-19: Kasus Yogyakarta", *Prisma*, no: 8 Tahun XII, Agustus 1983, hlm. 70-71.

Aksi-aksi mogok baru berhenti setelah tuntutan para buruh dipenuhi.

Diantara tuntutan para buruh yang dipenuhi adalah:

1. Setelah pemogokan upah buruh menjadi 30 sampai 40 duit<sup>90</sup> per hari.
2. Pekerjaan-pekerjaan diperkebunan tebu seperti pengangkutan tebu ke lori dan pembersihan *rapak* yang sebelumnya tidak di upah, setelah pemogokan diberi upah. Upah yang diberikan sebesar 16 duit untuk siang hari dan 24 duit untuk malam hari. Untuk perataan sawah setelah penebangan diberi upah 20 duit. Upah itu diberikan secara langsung tanpa perantara.
3. Jumlah jam kerja diperkebunan diperingan. Para buruh keberatan jika jam kerja berlangsung dari jam 07.00 sampai jam 17.00. Setelah pemogokan permintaan keringanan beban jam kerja itu dikabulkan. Akan tetapi literatur-literatur yang penulis temukan tidak menjelaskan berapa jumlah jam kerja yang dikurangi.
4. Upah pembuatan parit berukuran 10 X 0,5 X 0,5 yang tadinya diberi upah 5 duit per parit, setelah pemogokan dinaikkan menjadi 40 duit per hari.
5. Bambu untuk pembuatan pagar perkebunan yang tadinya dibeli dengan harga 3 duit per batang, dinaikkan menjadi seharga 10 duit, sama dengan harga pasar.
6. Air irigasi dibagi secara adil dan merata antara kepentingan petani dengan perkebunan.
7. Jaga malam terhadap tebu tebangan dihapuskan dan memberi upah kepada gerobak pengangkut tebu sejumlah 6 duit.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> 1 duit = 1,25 sen. *Ibid.*

<sup>91</sup> Purwanto, *op. cit.*, hlm. 65-68.

Sedangkan tuntutan para buruh yang tidak dipenuhi adalah:

1. Masalah beban kerja wajib gugur gunung dan ronda malam ( kecuali jaga malam untuk tebu tebanan ). Pemerintah menganggap bahwa kedua beban kerja itu sudah sesuai dengan *Pranatan Nagari*.
2. Masalah pengembalian *glebagan* yang terlambat dan menyebabkan kerugian petani, tidak ditanggapi pemerintah.
3. Masalah yang dihadapi petani mengenai ekspansi tanaman tebu terhadap padi yang mencapai dua pertiga dari luas sawah yang dimiliki juga tidak ditanggapi oleh pemerintah.<sup>92</sup>

Setelah terjadi pemogokan, beban yang harus ditanggung oleh petani dan buruh menjadi lebih ringan. Sebelum terjadi pemogokan mereka harus mengorbankan waktu selama 150 hari dalam setahun. Setelah pemogokan beban itu menjadi ringan karena telah banyak berkurang. Keringanan kerja itu secara resmi baru diberikan pemerintah pada tanggal 28 Juni 1886. Pada waktu itu Residen Yogyakarta van Baak mengeluarkan Surat Keputusan No. 673 TB/ 1886, yang isinya menyatakan bahwa kerja rodi siang hari dibatasi satu kali dalam lima hari. Untuk masalah kerja rodi dalam bentuk kerja malam untuk pabrik gula harus ditetapkan oleh pamong praja setelah berunding dengan manajer pabrik.<sup>93</sup>

Setelah terjadi pemogokan keadaan petani dan buruh di Yogyakarta dirasakan lebih baik. Hal itu berpengaruh pula pada keamanan di Yogyakarta.

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> Selo Soemardjan, *op. cit.*, hlm. 224.

Perampokan menurun secara drastis. Pada tahun 1882 terjadi 29 perampokan, sedangkan pada tahun 1883 hanya 10 kasus. Menurunnya kasus perampokan itu mengindikasikan bahwa taraf hidup rakyat meningkat.<sup>94</sup>

Perjuangan para buruh dan tani ternyata tidak sia-sia. Walaupun banyak sekali hambatan yang dihadapi, baik dari pemerintah maupun dari para pengusaha tetapi usaha yang dilakukan membuahkan hasil. Korban yang berjatuhannya ternyata menjadi tumbal bagi keberhasilan saudara-saudaranya.

Kasus di Yogyakarta merupakan contoh perjuangan buruh dalam memperbaiki nasib. Gerakan pemogokan ini merupakan aksi protes yang paling berhasil dan pertama kali terjadi di wilayah Hindia Belanda pada abad ke-19. Ternyata para buruh tidak tinggal diam dan menyerah pada nasib. Berkat perjuangan yang gigih mereka berhasil menaikkan upah dan meringankan beban kerja. Akhirnya taraf hidup mereka juga meningkat. Pada bab berikutnya akan dibuat simpulan dari jawaban permasalahan yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.

---

<sup>94</sup> Djoko Utomo, *op. cit.*, hlm. 76.

## BAB V

### SIMPULAN

Sebagai akhir dari rangkaian penulisan ini akan disimpulkan berbagai jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan. Simpulan ini disampaikan secara urut mulai jawaban permasalahan pertama hingga jawaban permasalahan ketiga.

Untuk memperoleh buruh, para pengusaha berupaya menarik minat penduduk desa dengan memberikan uang muka. Sesuai dengan prinsip liberal maka mereka juga mengadakan kontrak. Upaya itu menjadi mudah karena penduduk desa di Jawa sudah mengenal hubungan *kawula-gusti* atau patron-klien. Melalui perjanjian yang dibuat, para pengusaha dianggap sebagai *gusti* atau patron baru menggantikan *gusti* atau patron tradisional. Mereka berhak memperoleh pelayanan dari buruh yang dianggap sebagai klien atau *kawula*. Sementara para buruh berhak memperoleh upah. Penduduk desa tertarik dengan uang muka itu sehingga mau bekerja di perkebunan tebu. Mereka menganggap bekerja di perkebunan tebu merupakan alternatif pemecahan bagi kesulitan ekonomi yang diderita.

Upaya lain yang ditempuh pengusaha adalah dengan memanfaatkan kewibawaan para kepala desa. Mereka menjadi perantara sekaligus saksi dalam perjanjian antara pengusaha dengan para buruh. Salain itu juga memberikan informasi tentang identitas para buruh, menegur buruh yang ingkar pada

perjanjian, bahkan kadang-kadang harus memaksa penduduk desa agar mau bekerja di perkebunan..

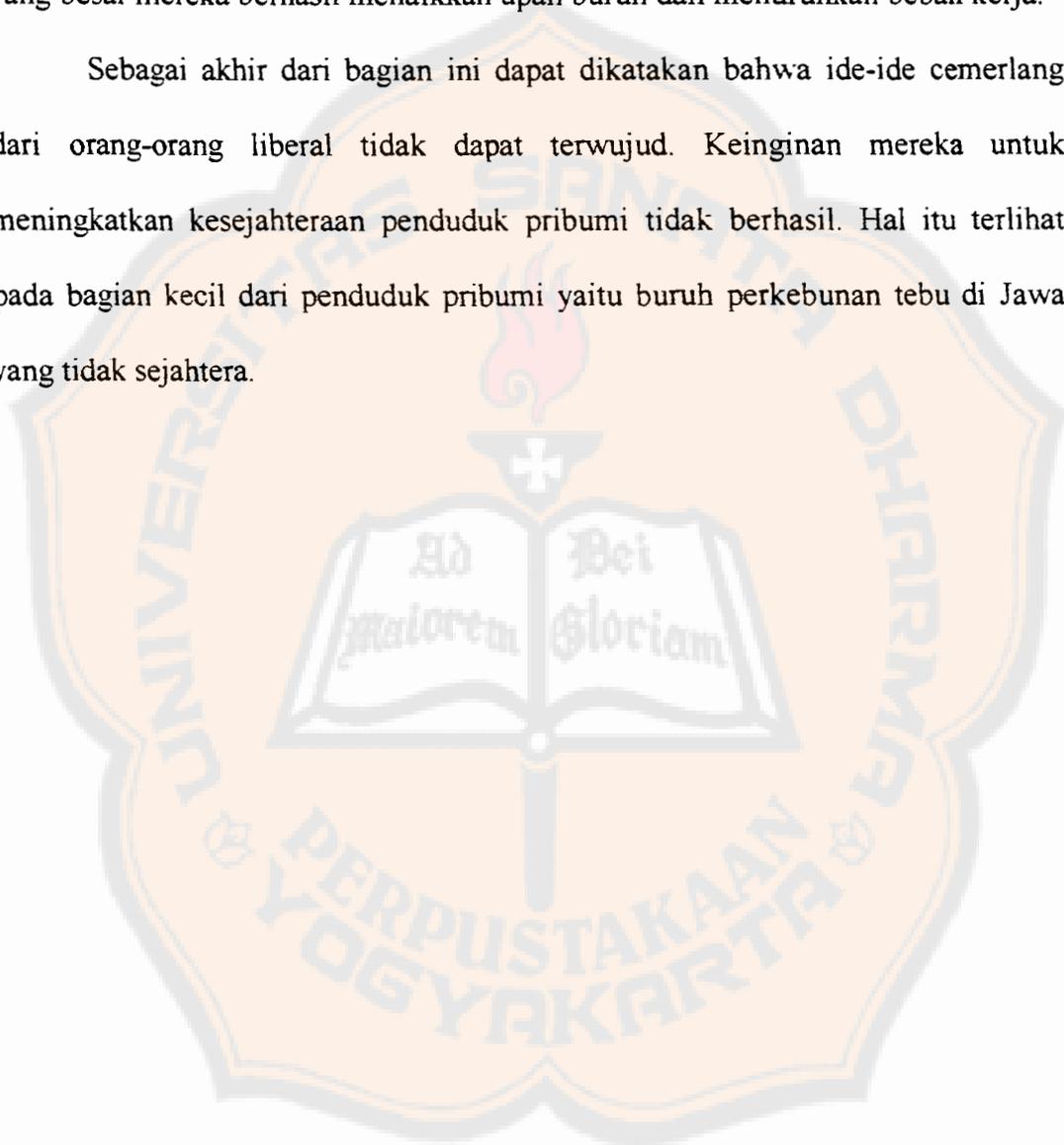
Pekerjaan-pekerjaan di perkebunan tebu tersedia terus sepanjang tahun karena tanaman tebu memerlukan penanganan yang intensif. Pekerjaan itu dapat dibagi menjadi tahap persiapan lahan dan penanaman, perawatan, dan penebangan. Apalagi dengan adanya sistem *glebagan* yang mengatur pergiliran tanaman antara tebu dengan tanaman pertanian di tanah-tanah milik petani. Pergiliran itu menjamin kontinuitas pekerjaan.

Selama satu periode tanam dibutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Kebutuhan itu tercukupi oleh buruh baik yang datang dari sekitar perkebunan maupun yang datang dari desa-desa yang jauh dari lokasi perkebunan. Bahkan banyak buruh yang datang dari desa-desa di luar karesidenan tempat beradanya perkebunan itu. Mereka ada yang hanya tinggal sementara dan ada yang tinggal menetap di sekitar lokasi perkebunan. Kehadiran para buruh itu telah menyebabkan terjadinya mobilitas penduduk. Mereka yang hanya tinggal untuk sementara waktu menimbulkan mobilitas non permanen atau mobilitas sirkuler, sedangkan mereka yang tinggal menetap menimbulkan mobilitas permanen atau migrasi.

Kehidupan para buruh setelah bekerja di perkebunan ternyata tidak sejahtera. Harapannya untuk mengatasi masalah ekonomi tidak terwujud. Upah yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Padahal para buruh masih harus menanggung beban lain yaitu kewajiban membayar pajak, berbagai

Gerakan sosial yang murni diprakarsai oleh buruh tebu terjadi di Yogyakarta pada tahun 1882. Perjuangan di daerah ini dilakukan dengan melakukan aksi pemogokan. Melalui perjuangan yang gigih dan pengorbanan yang besar mereka berhasil menaikkan upah buruh dan menurunkan beban kerja.

Sebagai akhir dari bagian ini dapat dikatakan bahwa ide-ide cemerlang dari orang-orang liberal tidak dapat terwujud. Keinginan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi tidak berhasil. Hal itu terlihat pada bagian kecil dari penduduk pribumi yaitu buruh perkebunan tebu di Jawa yang tidak sejahtera.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Albertini, Rudolf von

1982 *European Colonial Rule, 1880-1940, The Impact of The West on India, South-East Asia, And Africa*. England: Clio Press.

Bambang Sulistyو

1995 *Pemogokan Buruh, Sebuah Kajian Sejarah*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.

Blitanagy, Josef Johanes

1984 *Hukum Agraria Nasional*. Ende Flores: Nusa Indah.

Breman, Jan

1986 *Penguasaan Tanah Dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial*. Jakarta: LP3ES.

Bung Karno

1956 *Indonesia Menggugat*. Djakarta: S. K. Seno.

Cribb, Robert (ed )

1994 *The Late Colonial State in Indonesia. Political And Economic Foundations of The Netherlands Indies 1880-1942*. Leiden: KITLV Press.

Day, Clive

1996 *The Policy And Administration of The Dutch in Java*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Elson, R. E.

1984 *Javanese Peasant And The Colonial Sugar Industry*. Singapore: Oxford University Press.

Escher, Franklin

1954 *Dari Koloni Menjadi Salah Satu Negara Terbesar, Sejarah Ringkas Amerika Serikat*, terjemahan. Djakarta: Endang.

Furnivall, J. S.

1967 *Netherlands India*. Cambridge: Cambridge University Press.

Geertz, Clifford

1983 *Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, terjemahan. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.

Gonggrijp, G.

1967 *Sedjarah Ekonomis Indonesia*, terjemahan. Yogyakarta: Stensilan.

Gottschalk, Louis

1975 *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Hall, D.G.E.

1998 *Sejarah Asia Tenggara*, terjemahan. Surabaya: Usaha Nasional.

Hassan Shadily

1983 *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve.

Husken, Frans

1988 *Masyarakat Desa Dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.

Ida Bagus Mantra

1985 *Pengantar Studi Demografi*. Yogyakarta: Nur Cahaya.

I Gusti Ngurah Agung

1992 *Metode Penelitian Sosial, Pengertian dan Pemakaian Praktis*. Jakarta: PT Gramedia.

Kartini Kartono

1980 *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Alumni.

Klerck, E.S. de

1938 *History of The Netherlands East Indies*. Rotterdam: W.L. and J. Brusse N.V.

Kuntowijoyo

1995 *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.

Leirissa, R.Z.

1990 *Sejarah Perlawanan Imperialisme Dan Kolonialisme di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

---

1996 *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Marwati Djoened Peospongoro dan Nugroho Notosusanto

1990 *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka.

Moedjanto, G

1987 *Konsep Kekuasaan Jawa*. Yogyakarta: Kanisius.

Mubyarto, et. al

1968 *Usaha Tani Tebu Dan Industri Gula di Jawa*. Laporan Survey Agro Ekonomi Indonesia Jilid I Bagian I. Yogyakarta: Tidak diterbitkan.

Multatuli

1972 *Max Havelaar atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda*, terjemahan. Djakarta: Djambatan.

Nagazumi, Akira ( peny )

1986 *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Prajudi Atmosudirdjo

1984 *Sejarah Ekonomi Indonesia Dari Segi Sosiologi*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Ramlan Surbakti

1992 *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.

Ricklefs, M.C.

1981 *Sejarah Indonesia Modern*, terjemahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Robertson, J.B. and J. Spruyt ( ads )

1967 *A History of Indonesia*. New York: ST. Martin's Press.

Ruggiero, Guide de

1967 *The History Of European Liberalism*. Boston: Beacon Press.

Salim, Peter dan Yenny Salim

1991 *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.

Sandra

1961 *Sedjarah Pergerakan Buruh di Indonesia*. Djakarta: PT. Pustaka Rakjat.

Sartono Kartodirdjo

1984 *Pemberontakan Petani Banten 1888*, terjemahan. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.

- 1984 *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan.
- 1992 *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium Jilid I*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- 1992 *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid II*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo  
1991 *Sejarah Perkebunan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Schapiro, J. Salwyn  
1959 *Liberalism It's Meaning And History*. New York: Princeton.
- Selo Soemardjan  
1986 *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, terjemahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Shively, W. Phillips  
1991 *Power And Choice, An Introduction to Political Science*. Mc Crow-Hill Inc.
- Siregar, A. Madjid  
1953 *Perkembangan Serikat Buruh di Beberapa Negara*. Djakarta: Pustaka Rakjat.
- Sudiono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi ( eds )  
1984 *Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa Dari Masa ke Masa*. Jakarta: PT Gramedia.
- Suhartono  
1991 *Apanage Dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- 1995 *Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa, Studi Historis 1850-1942*. Yogyakarta: Aditya Media.

Suwarno, P. J. , G. Moedjanto, Soehardjo Hatmosuprobo  
1980 *Sejarah Indonesia Dalam Monografi*. Yogyakarta: Jurusan Sejarah dan Geografi, IKIP Sanata Dharma.

Vlekke, Bernard H.M.  
1967 *Nusantara ( Sejarah Indonesia )*, terjemahan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Malaysia.

Winarno Surachmat  
1982 *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Dan Tehnik*. Bandung: Tarsito.

### B. Sumber-Sumber Lain

Kosim, E  
1970 "Suatu Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia Akibat Dari Imperialisme Jang Bersembojan Faham Liberal Pada Akhir Abad ke-19", *Makalah Seminar Sedjarah Nasional II*, 26-29 Agustus di Yogyakarta.

*Prisma*. No. 8 Tahun XII, Agustus 1983.

Purwanto  
1987 *Pemogokan Buruh Tebu di Yogyakarta Pada Tahun 1882 ( Studi Gerakan Sosial )*. Yogyakarta: Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, skripsi, tidak diterbitkan.

Soetjipto, F.A.  
1970 "Pengaruh Onderneming Tebu Pada Kehidupan Masyarakat di Djawa Abad ke-19", *Makalah Seminar Sedjarah Nasional II*, 26-29 Agustus di Yogyakarta.

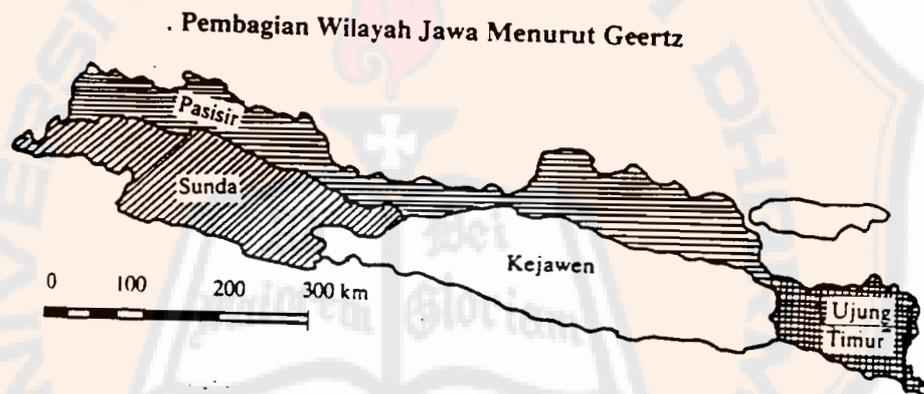
Tanto Sukardi  
1996 *Perkebunan Tebu di Karesidenan Banyumas 1838-1900*. Yogyakarta: Tesis, tidak diterbitkan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



# L A M P I R A N

Lampiran 1



Sumber: Clifford Geertz, Involusi Pertanian, Proses-Perubahan Ekologi di Indonesia, terjemahan (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1985), hlm. 44.

Lampiran 2



Pertumbuhan Penduduk di Jawa

tahun	Jumlah Penduduk	Keterangan
1781	2.029.915	taksiran Radermacher
1795	3. 500. 000	taksiran Nederburg
1815	4.499.250	sensus pertama
1846	9.542.045	perhitungan Bleeker
1880	19.794.505	sensus administratif
1905	30.360.667	sensus penduduk

Sumber: G. Gonggrijp, *Sedjarah Ekonomis Indonesia*, terjemahan ( Yogyakarta: Stensilan, 1967 ), hlm. 129.

Lampiran 3

Tanaman-tebu 1870-1891. Tanaman dalam bau ( 0,7 Ha )

tahun	kepunyaan pemerintah	pembelian tebu	penanaman bebas	penanaman atas tanah partikelir	penanaman atas persil erfpacht	penanaman di daerah kerajaan	jumlah penanaman
1870	39.546	—	3.807	4.125	795	7.348	55.621
1875	38.605	501	10.036	3.900	2.046	10.354	65.442
1880	35.725	275	16.652	3.900	1.754	8.245	66.551
1885	20.567	805	39.030	2.850	2.363	9.994	75.609
1891	2.721	5.037	86.856	8.150	2.470	12.625	117.865

Sumber: Prajudi Atmosudirdjo, *Sejarah Ekonomi Indonesia Dari Segi Sosiologi*, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 1984 ), hlm. 238.

Lampiran 4

Pabrik Dan Perkebunan Yang Terlibat Program Pemogokan Pada Masing-Masing

Gelombang:

Gelombang I ( awal minggu terakhir bulan Juli 1882 hingga 4 Agustus 1882 ):

1. Pabrik Gula Barongan ( Kabupaten Kalasan )
2. Pabrik Gula Padokan ( Kabupaten Bantul )
3. Pabrik Gula Bantul
4. Pabrik Gula Cebongan ( Kabupaten Sleman )

Gelombang II ( tanggal 5 Agustus 1882 hingga 22 Agustus 1882 )

1. Pabrik Gula Ganjuran ( Kabupaten Bantul )
2. Pabrik Gula Gesikan ( Kabupaten Bantul )
3. Perkebunan tebu Plered ( Kabupaten Kalasan )
4. Perkebunan nila Ngoto ( Kabupaten Kalasan )
5. Perkebunan tembakau Siluk Centeng ( Kabupaten Kalasan )

Gelombang III ( tanggal 23 Agustus hingga pertengahan bulan Oktober 1882 ):

1. Perkebunan nila Salakan Potorono ( Kabupaten Kalasan )
2. Perkebunan nila Salakan Lor ( Kabupaten Kalasan )
3. Perkebunan nila Waludoyo ( Kabupaten Kalasan )
4. Perkebunan nila Waringin ( Kabupaten Kalasan )
5. Perkebunan nila Sonosewu ( Kabupaten Sleman )

6. Perkebunan nila Demak Ijo (Kabupaten Sleman )
7. Perkebunan nila Kebon Agung (Kabupaten Sleman )
8. Perkebunan nila Mlati (Kabupaten Sleman )
9. Perkebunan nila Pendulan (Kabupaten Sleman )
10. Perkebunan nila Dukun dan Pisangan (Kabupaten Sleman )
11. Perkebunan nila Mengkang Rejo ( Kabupaten Bantul )
12. Perkebunan nila Kenayan ( Kabupaten Kalasan )
13. Perkebunan nila Muja-Muju ( Kabupaten Kalasan )
14. Perkebunan tebu Rewulu ( Kabupaten Sleman )
15. Perkebunan tebu Pundong ( Kabupaten Bantul )
16. Perkebunan tebu Ngemplak ( Kabupaten Sleman )
17. Perkebunan tebu Klaci ( Kabupaten Sleman )
18. Perkebunan tebu Tegal Waru ( Kabupaten Sleman )
19. Perkebunan tebu Mlati ( Kabupaten Sleman )
20. Perkebunan tebu Tanjung Tirto ( Kabupaten Kalasan )
21. Perkebunan Tembakau Rejosari ( Kabupaten Kalasan )

Sumber: Djoko Utomo, "Pemogokan Buruh Tani di Abad ke-19: Kasus Yogyakarta", *Prisma*, no 8 Tahun XII, Agustus 1983, hlm. 69-72.

Lampiran 5



Isi Undang-Undang Agraria tahun 1870:

1. Gubernur Jenderal tidak diperbolehkan menjual tanah.
2. Dalam larangan ini tidak termasuk tanah-tanah kecil untuk perluasan kota dan desa dan untuk mendirikan perusahaan-perusahaan.
3. Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah menurut peraturan Undang-Undang. Dalam peraturan ini tidak termasuk tanah-tanah yang telah dibuka oleh rakyat asli, atau yang digunakan untuk menggembalakan ternak umum, ataupun yang masuk lingkungan desa untuk sesuatu keperluan yang lain.
4. Dengan peraturan Undang-Undang akan diberikan tanah-tanah dengan hak erfpacht untuk waktu paling lama 75 tahun.
5. Gubernur Jenderal menjaga agar jangan sampai pemberian tanah-tanah itu melanggar hak rakyat asli.
6. Gubernur Jenderal tidak akan mengambil kekuasaan atas tanah-tanah yang telah dibuka rakyat asli untuk keperluan mereka sendiri, atau yang masuk lingkungan desa untuk tempat penggembalaan ternak umum ataupun untuk keperluan lain, kecuali untuk kepentingan umum berdasarkan pasal 133 Agrarische Wet. Dan untuk keperluan perkebunan yang diselenggarakan atas perintah atasan menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk itu; segala sesuatu dengan pemberian pengganti kerugian yang layak.
7. Tanah-tanah yang dimiliki rakyat asli dapat diberikan kepada mereka itu dengan hak eigendom, disertai syarat-syarat pembatasan yang diatur dalam Undang-undang, dan harus tercantum dalam surat tanda eigendom itu, yakni mengenai kewajiban-kewajiban pemilik kepada negara atau desa, dan pula tentang hak menjualnya kepada orang yang tidak termasuk rakyat asli.
8. Persewaan tanah oleh rakyat asli kepada orang-orang yang bukan rakyat asli berlaku menurut peraturan Undang-Undang.

Sumber: Josef Johanes Blitanagy, *Hukum Agraria Nasional* (Ende-Flores: Nusa Indah, 1984), hlm. 16-17.